

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.690, 2015

KEMENDAGRI. Urusan Pemerintahan. Tahun 2015. Penugasan. Pelimpahan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015, terdapat perubahan alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri;
 - b. bahwa dengan adanya penetapan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, terdapat perubahan nomenklatur Program lingkup Kementerian Dalam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 : 1. Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, dan Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);

- 13. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI **TENTANG** PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI **DALAM** NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN **DALAM** NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat , meliputi:
 - a. Program Bina Administrasi Kewilayahan;
 - b. Program Bina Pembangunan Daerah;
 - c. Program Bina Pemerintahan Desa;
 - d. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - e. Program Penataaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 2. Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
 - a. Program Bina Administrasi Kewilayahan;
 - b. Program Bina Pembangunan Daerah; dan
 - c. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 3. Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Gubernur menunjuk dan menetapkan KPA pelaksana kegiatan dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur.

4. Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Menteri menetapkan KPA pelaksana kegiatan tugas pembantuan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan gubernur dan bupati/walikota yang menerima penugasan.
- (3) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri.
- (4) Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Menteri mendelegasikan penunjukan KPA atas pelaksanaan tugas pembantuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
 - 5. Pasal 20 diubah dan ditambahkan 1 (ayat), sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) KPA kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 ayat memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menetapkan PPK;
 - b. menetapkan PPSPM;
 - c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
 - d. menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - e. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;

- g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- h. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- i. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- j. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- k. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
 - (2) Menteri mendelegasikan penetapan Bendahara Pengeluaran kepada kepala Satuan Kerja.
- 6. Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dihapus

Pasal 23

Dihapus

Pasal 24

Dihapus

- 7. Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Menteri menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan Keputusan Menteri.
 - (2) Penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Madya.
 - (3) Penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- 8. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015,

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2015 MENTERI DALAM NEGERI, REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2
TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENDAGRI
TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK MASING-MASING PROVINSI

	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	191 (2	
	0		SEMULA		MENJADI
PROV	INSI ACEH	Rp	3 4,852,808,000	Rp	4 57,281,874,00
a. PR	COGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN CLAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI	1.10	1,002,000,000	144	07,201,071,00
	Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	270,000,000	Rp	
b. PR	OGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda				
	Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	728,000,000	Rp	728,000,00
c. PF	ROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
1)	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	288,414,000	Rp	
2)	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	133,920,000	Rp	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	436,950,000	Rp	
3)	Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	120,000,000	Rp	
4)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	109,934,000	Rp	
5)	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa				
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	121	Rp	49,002,500,000
1.5900 (0.5000)	OGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah				
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	915,590,000	Rp	782,990,00
2)	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar				
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	250,000,000	Rp	223,316,00
3)	Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	1,000,000,000	Rp	904,000,00
4)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	600,000,000	Rp	534,588,00
DA	OGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN AN PENCATATAN SIPIL				
1)	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	12	Rp	5,106,480,00

DEERSHI/PROGRAM REGISTANY SEGUETANY SEMULA 3		DAFDAU/DDOGDAM/VFGIATAN/SIID VFGIATAN		ALOKASI (Rp.)				
2. PROCNISSI SIMATERA UTARA P. P. 4,186,341,000 P. 39,992,787,00 P. 2,70,000,000 P. 39,992,787,00 P. 2,70,000,000 P. 2	NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				7 1		
a. PROGRAM DULINGAM MANA_REMENDAM PELAKSAMAM TUGAS TEKRIS LAINWA KEMENDAGRI. 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggarana Kegiatan DKTP Langkup Kemendagai Tahun 2013 b. PROGRAM PENGEMBARANA SUMBER DAYA MANUSIA AFARATUR PEMERITTAHAN DALAM NEGERI 1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Laimya Badan Pengembangan SDM a) Koordinasi Pendembangan Teknis Laimya Badan Pengembangan SDM a) Koordinasi Pengembangan SDM badah Pengembangan SDM a) Koordinasi Pengembangan SDM a) Koordinasi Pengembangan SDM a) Koordinasi Pengembangan SDM a) Koordinasi Pengembangan Kediklatan 1) Legatan Dukungan Teknis Laimya Dijen Bina Bangda a) Penguatan Penn Provinsi dalam Pengendalian, Penguatan Penguatan Penguanan dan Penbangganan Unsan Penguanan dan Penbangganan Unsan Penguanan dan Penguatan Penguatan Kapasatas Penyelenggaraan Pencerintehan Desa dan Kelurahan a) Kegiatan Pelatihan Manajarakat Aliangan Penguanan Pe	- 2200		- D		D			
PELAKSAMAAN TUGAS TEKRIS LAINEYA REMENDAGRI 1	2.		Кр	4,186,341,000	кр	59,992,787,000		
a) Koordinasi Manajaman Perencanaan dan Pengandalan Pengengadalan Pengengadalan Pengengadalan Pengengadalan Pengengadalan Pengengadalan Pengengadalan Pengengan Subman Kejatan DiKTP Lingkup Kemendaga Tahan 2015 b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMEER DAYA MANUSIA APARATUR PEMISRINTAHAN DALAM MEGERI 1) Kegiatan Dukungan Manajamen dan Teknis Lainnya Badan Pengenbalangan SDM a) Koordinasi Pengenbangan SDM a) Koordinasi Penghangan Manajamen dan Teknis Lainnya Badan Pengendan Pengan Manajaman Daga Angaran dan Dukungan Teknis Lainnya Digian Bina Bangda a) Pengutan Penan Provinsi dalam Pengendalan, Pelaporan dan Pedakasi Penandalan Pengendalan, Pelaporan dan Pedakasi Penandalan Pengendalan, Pelaporan dan Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbanguan Ursan Penendalan Daerah I a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbanguan Ursan Pemendalan Daerah I a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbanguan Ursan Pemendalah Daerah I a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbanguan Ursan Pemendalah Daerah I a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbanguan Ursan Pemendalah Daerah I a) Penanganan Lahan Keritis dan Sumber Daya Air Berbanguan Ursan Pemendalah Daerah I a) Regiatan Pengengandakan (Papasa) Penanganan Lahan Keritis dan Sumber Daya Air Berbanguan Ursan Pemendalah Daerah Penanganan Daerah Apasatan Kapasitan Penyelanggaran Pemerintahan Daesa dan Kelurahan Baga Kengatan Pengenbangan Ursan Berbangan Daerah Bertah Manajarakat Daerah Bertah Manajarakat Daerah Bertah Beronam Manyarakat Berbangan Daerah Berta Kerjasana								
Pengendakan Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendaga Tahun 2013	ν,	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran						
Lingkup Kemendagn Tahun 2015 b. PROGRAM PENCEMBAGAN SUMBER DAYA MAHUSIA APARATUR PEMBERINTAHAN DALAM NEGERI 1) Kegistan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklaten Rp 273,900,000 Rp 273,900,00 Rp 273,900,000 Rp 652,000,000 Rp 153,000,000 Rp 170,270,000 Rp 170,270,0	3		Rp	270,000,000	Rp	5		
b. PROGRAM PENDEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMBERINTAHAN DALAM NEGERI 1] Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM a) Koordinasi Fembiniaan Program Kediklatan Rp 273,900,000 Rp 273,900,00 c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH 1] Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Digien Bina Bangda a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Peleporasi dan Evolusei Pentanfaetan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2] Kegiatan Pembiniaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I a) Penangaana Linaha Krisi dan Sumber Daya Air Berbasis Masyardaki (PLISDA BM) d. PROGRAM BINA PEMBERINTAHAN DESA 1] Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bag Kepala Desa 2] Kegiotan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pensatana Lembaga Kemasyarakatan di Deerah Pelatihan Masyarakat a) Pensatana Lembaga Kemasyarakatan di Deerah Pelatihan Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Pansyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 4) Kegiatan Dekungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dijen PMD a) Fasilitasi Pengupatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dijen PMD 3) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kuder Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa b) Rp 99,980,000 Rp 2) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kuder Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa c) PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Albunistrasi Kependudukan dan Pembatkuan Nama Kupabumi Unaur Bustafan c) PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kepandudukkan (SAK) Terpadu a) Perokensentrasi Peningkatan Peran Cubernur Sebagai Waki Perengeana Batasa Berari dan Pembatkuan Nama Kupabumi Unaur Bust								
APARATUR PEMBERNITAHAN DALAM NEGER		(A) (C)	+			15		
Badan Pengembangan SDM a) Koordinasi Pembinaan Program Kedildatan Rp 273,900,000 Rp 273,900,000 c. PROGRAM BINA PEMBARGUNAN DAERAH 1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dijuen Bina Bangda a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporen data Evaluasi Pemerinathan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Penyelenggaraan dan Pendangunan Urusan Penyelenggaraan dan Penghangunan Hahan Kritis dan Sumber Daya Air Perbasis Masyarakat (PIKSDA-BM) d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Penerintahan Desa dan Kelurahan b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan 3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditin PMD a) Fasilitasi Penguatan Kalembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengerahayaan Masyarakat Perangutan Kader Desa a) Dekonsentrasi Peningkatan Pengram Rp Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan b) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Milayah b) Kegiatan Pengembangan Sapasitas Aparatur dan Bader Pensahanan Baderah Aparatur Desa C, PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN b) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kepandudukan (SAK) Terpadu b) Penbakacan Managaran Administrasi Kependudukan dan Pensatatan Spil Penorintah Pusat di Milayah b) Pendakacan Managaran Administrasi Kependudukan dan Pensatatan Spil Perovinsi B) PROVINSI SUMATERA BARAT C, PROGRAM DIRANA MANAJEMEN DAN PELASSANAAN TUGAS TEKHIS LAINNYA KEMENDAGRI C) PROGRAM DIRANGAN MANAJEMEN DAN PELASSANAAN TUGAS TEKHIS L						11		
c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH 1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembanganan Unusan Pemerintahan Daerah I a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berhasis Masyarakat (PLKSDA-BM) d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA 1) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bag Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Bag Bag Kegiatan Pelatihan Manajemen Manajeman Man		Badan Pengembangan SDM						
1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelanis Laimnya Ditjen Bina Bangda a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemendaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Unuan Pembangunan Unuan Pembangunan Unuan Pembangunan Unuan Pembangan Bahak Kitis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) 4) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) 4) Penganganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) 4) Penganganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) 4) Penganganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) 4) Pengangan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa 2) Kegiatan Pengalkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Dasa Bagi Kepala Desa 2) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Teringgal 4) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Pasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 1) Kegiatan Pengembangan Kapasitas KEPENDUDUKAN 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Rama Rupabuni Unsur Bustatan 4) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Rap Pengendudukan Siski Pengendudukan Rama Rupabuni Unsur Bustatan 5) PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2) Pengatan Pengembangan Kapasi Kependudukan Rap Pengendudukan Rama Rupabuni Unsur Bustatan 4) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Rap Pengendudukan Rama Rupabuni Unsur Bustatan 5) PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2) PROGRAM DUKUNGAM MANAJEMEN DAN PENACATATAN DAN PROGRAM PENATAAN ADMIN		a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	273,900,000	Rp	273,900,000		
Teknis Laimnya Ditjen Bina Bangda a) Pengutatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program. Dana Alokasi Khusus (DAK) 2 Kegiatan Pembinam Penyelnggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasais Massyarakat (PLKSDA-BM) d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA 1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Manyarakat kan kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan 3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat trainggal 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Laimnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa b) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa c) PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinam dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Kegara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pengembangan Satem Administrasi Kependudukan Sepa Pembakanan Aman Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN FENACATATAN SIPL 1) Kegiatan Pengembangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3) PROVINSI SUMATERA BARAT 4. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Pernecanaan Program dan								
Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kehurahan a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat a) Penataan Lembaga Kemasyarakat di Daerah Bagi Kepala Desa 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah B) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan 3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 4) Kegiatan Delungan Manjemen dan Dukungan Teknis Laimya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Sapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Rapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Rinusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Keci Terluar a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Rinusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Keci Terluar a) Dekonsentrasi Pengasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 6, PROGRAM PENATAHA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Rp Pencatatan Sipil Provinsi 3) PROVINSI SUMATERA BARAT 4, PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp								
2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan 3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Mesyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Rayarakat Tertinggal 4) Kegiatan Dukungan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kemasyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengenbangan Kemasyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengenbangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa Rp 99,980,000 Rp Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa Rp Rp 41,809,700,00 c) PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah 6, PROGRAM BINA TANA DMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah Repubakui Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Rp Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 6, PROGRAM PENATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Rp Penbakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 6, PROGRAM DIKUNGAN MANAJEMEN DAN PENCATATAN PENANGAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp P		Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program	Rp	652,000,000	Rp	652,000,000		
a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Penerintahan Desa dan Kelurahan 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan 3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Pergeraan an Angaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp		2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan				,		
d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bag Kepala Desa 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan 3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa Rp 99,980,000 Rp PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayuh 2) Kegiatan Pengembangan Rayasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Spil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT Rp 4,960,036,000 Rp 17,192,764,000 Rp 17,1		a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air	Rp	153,000,000	Rp	153,000,000		
Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan 3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Laimnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa Rp 99,980,000 Rp enberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 1) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa Rp - Rp 41,809,700,00 e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Rp 822,565,000 Rp 699,445,00 Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATANA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peneatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANANAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Pencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp								
Bagi Kepala Desa 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah Rp 170,270,000 Rp b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Rp 610,670,000 Rp 3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa Rp P, 41,809,700,000 c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulua-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp								
Pelatihan Masyarakat a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Rp 610,670,000 Rp 3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Laimya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Pernecanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp			Rp	268,956,000	Rp	-		
b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan 3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa c) PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Pencenanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp								
3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditijen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa Rp Rp Rp 41,809,700,000 c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Rp 822,565,000 Rp 699,445,000 Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Albekuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT Rp 4,960,036,000 Rp 17,192,764,000 PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Percencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp		a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	170,270,000	Rp	標		
a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa Rp - Rp 41,809,700,000 c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Rp 822,565,000 Rp 699,445,000 Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Rependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Rp - Rp 15,694,377,00 PROVINSI SUMATERA BARAT Rp 4,960,036,000 Rp 17,192,764,000 3 PROVINSI SUMATERA BARAT Rp 4,960,036,000 Rp 17,192,764,000 a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp		b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	610,670,000	Rp	(4)		
Masyarakat Tertinggal 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubermur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp		3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
Teknis Lainnya Ditjen PMD a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PEMATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp		ON ■ STATE AND ADMINISTRATION OF STATE AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF	Rp	65,000,000	Rp	-		
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencetatan Sipil Provinsi PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp						,		
Rader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp			Rp	99,980,000	Rp	=		
c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp								
1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp		a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	151	Rp	41,809,700,000		
Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp		c. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN						
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp								
Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp			Rp	822,565,000	Rp	699,445,000		
Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp						,		
DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp		5	Rp	800,000,000	Rp	710,365,000		
Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp		A STATE OF THE STA						
Pencatatan Sipil Provinsi 3 PROVINSI SUMATERA BARAT a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp								
a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp			Rp	-	Rp	15,694,377,000		
a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp	3	PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp	4,960.036.000	Rn	17,192,764,000		
Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp	-	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN		., 0,000,000	-1			
a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Rp 270,000,000 Rp			+					
Lingkup Kemendagri Tahun 2015		a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP	Rp	270,000,000	Rp			

î.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	SI (R	р.)
1			SEMULA		MENJADI
1	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		3	e e	4
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM				
r	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	229,100,000	Rp	229,100,00
١,	e. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			1860	
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda 				
2000	 a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 	Rp	637,000,000	Rp	637,000,00
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp	460,000,000	Rp	460,000,00
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III				
	a) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun	Rp	300,000,000	Rp	300,000,00
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	261,322,000	Rp	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	109,760,000	Rp	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	363,230,000	Rp	
t	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	 a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 	Rp	230,000,000	Rp	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	96,606,000	Rp	
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa	_			-
L	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	18	Rp	7,692,500,00
9	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah			201	
	 a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 	Rp	853,018,000	Rр	695,374,00
H	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan				
	Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar				
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	300,000,000	Rp	250,000,00
	 Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	450,000,000	Rp	399,000,00
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
2.22	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN BENCATATAN SIBU	Rp	400,000,000	Rp	356,224,00
-	DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	-	Rp	6,173,566,00
	PROVINSI RIAU	Rp	5,264,436,000	Rp	22,310,443,00
F					

).	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	191 (K	* 1
+	<u> </u>		SEMULA		MENJADI
4	2 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran		3		4
0	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	270,000,000	Rp	
b	o. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM 				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	200,000,000	Rp	200,000,0
С	p. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH 1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	640,000,000	Rp	640,000,0
d	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	254,672,000	Rp	
	 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	89,755,000	Rp	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	247,730,000	Rp	
L	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	65,000,000	Rp	
2	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp	474,490,000	Rp	
-	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD A) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program	Rp	95,122,000	Rp	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan	I CP	50,122,000	1.45	
	Kader Desa	100001		12200	
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp		Rp	12,844,100,0
е	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah	D	852 667 000	D	600 667 /
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan	Rp Rp	852,667,000 400,000,000	Rp Rp	690,667,0 379,840,0
	Kerjasama antar Daerah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan	1.45		r.cp	
	Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan	Rp	650,000,000	Rp	577,533,0
-	Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan	Rp	450,000,000	Rp	420,000,0
	Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan dan PPKT, dan Peningkatan Hubungan Kerjasama di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia RI-PNG dan RI- RDTL				
	Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat A) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Rp	300,000,000	Rp	355,000,0
	Bagi Satpol PP serta Linmas 4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan	**************************************	es reacting 4 date - react Digital (E. 100 - 101 -		as somewhat as silver
	Bencana dan Kebakaran a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan	Rp	275,000,000	Rp	245,135,0
1	Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran		AB		An 160

)	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	181 (R <u>j</u>	10 - 50
4			SEMULA		MENJADI
	2 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu		3		4
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	ā	Rp	5,958,168,000
1	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp	4,906,650,000	Rр	7,776,684,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI	-			
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	 a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015 	Rp	270,000,000	Rp	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM		200,000,000		200 000 000
ŀ	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	200,000,000	Rp	200,000,000
ŀ	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda	1			
	 a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 	Rp	678,000,000	Rp	678,000,00
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	293,322,000	Rp	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		Watcherson Comita Venezulation and		
ļ	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	73,180,000	Rp	ଖ
ļ	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	165,970,000	Rp	5
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		18 8		
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	175,000,000	Rp	
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp	438,340,000	Rp	
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		101000000	-	
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	104,088,000	Rp	
	 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa 				
ŀ	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	100	Rp	2,735,300,000
ŀ	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	 Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah 				
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	858,750,000	Rp	714,678,00
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar	D	450,000,000	D	424 500 00
	 a) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan 	Rp	450,000,000	Rp	434,500,00
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan				
	Perlindungan Masyarakat a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	500,000,000	Rp	475,000,00
ŀ	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	700,000,000	Rp	623,644,00
ŀ	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				

)	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	ISI (R	р.)
	, , ,		SEMULA		MENJADI
-	2		3		4
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	5	Rp	1,915,562,00
4	PROVINSI JAMBI	Dec	4 005 022 000	Dec	19 940 166 00
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran	Rp	4,905,933,000	Rp	18,849,166,00
-	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015 b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp	270,000,000	Rp	
ŀ	APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya				
ŀ	Badan Pengembangan SDM	Do	200 000 000	D.	200 000 00
ŀ	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	200,000,000	Rp	200,000,00
	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	643,000,000	Rp	643,000,0
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	262,102,000	Rp	
	 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	82,440,000	Rp	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	223,260,000	Rp	
ı	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	175,000,000	Rp	
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD	Dec	07 180 000	Dec	
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	97,180,000	Rp	
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa				
١	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp		Rp	11,288,900,00
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan	-			
	Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur	Rp	727,951,000	Rp	636,591,0
	Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan	Rp	450,000,000	Rp	429,977,0
	Kerjasama antar Daerah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-1	
	Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	300,000,000	Rp	250,011,0
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	950,000,000	Rp	859,000,0
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	525,000,000	Rp	467,775,0
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				

	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOK <i>A</i>	SI (R	р.)
1	74 - 5946 - 74		SEMULA		MENJADI
4	2 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi		3		4
	Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	ē	Rp	4,073,912,00
	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rp	9,648,359,000	Rp	34,397,224,0
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	270,000,000	Rp	
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH 1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program	Rp	647,000,000	Rp	647,000,00
ŀ	Dana Alokasi Khusus (DAK) c. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	Rp	287,922,000	Rp	
	Bagi Kepala Desa 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	97,300,000	Rp	
-	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	301,158,000	Rp	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	D	4.010.020.000	B	
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi 4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp	4,912,032,000	Rp	
ŀ	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	175,000,000	Rp	
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan	Rp	102,476,000	Rp	
	Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	(3)	Rp	22,078,100,00
	d. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah				
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	772,471,000	Rp	654,583,0
-	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan	Rp	250,000,000	Rp	223,316,0
2	Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan	тф	200,000,000	ю	220,010,0
	Perlindungan Masyarakat a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Rp	1,100,000,000	Rp	904,000,0
-	Bagi Satpol PP serta Linmas 4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran e. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp	733,000,000	Rp	652,990,0
	DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi				
	Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	=	Rp	9,237,235,0

MO	DAEDAH I IDDOODAM I IZOOTAMAN I OUD IZOOTAMAN		ALOKA	ASI (R	p.)
NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SEMULA		MENJADI
1 8.	2 PROVINSI BANGKA BELITUNG	Dec	3,658,802,000	Dec	4 6,956,424,000
ο.	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN	Rp	3,036,602,000	Rp	0,930,424,000
	PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan	Rp	270,000,000	Rp	=
	Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015				
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				1
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM 				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	200,000,000	Rp	200,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH	3.0			
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan				
	Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda		00000000 28 1850n 95000000	90	
	 a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 	Rp	662,000,000	Rp	662,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Representation Description				
	Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	Rp	284,590,000	Rp	
	Bagi Kepala Desa	I TOP	201,050,000	тър	
	 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	69,680,000	Rp	:=
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	164,590,000	Rp	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	230,000,000	Rp	-
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp	462,440,000	Rp	-
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD 				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	100,948,000	Rp	=
	 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa 				,
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	-	Rp	2,929,700,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	 Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah 				
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur	Rp	814,554,000	Rp	686,154,000
	Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan				8
	Perlindungan Masyarakat				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	400,000,000	Rp	400,000,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				8
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	-	Rp	2,078,570,000
9	PROVINSI BENGKULU	Rp	3,911,396,000	Rp	15,968,018,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN	T.h	0,511,050,000	ī.h	10,500,010,000
	PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	270,000,000	Rp	-

	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA SEMULA	191 (K	MENJADI
\vdash	2		3		4
b.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	200,000,000	Rp	200,000,0
c.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH	0			
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	670,000,000	Rp	670,000,0
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				
U.	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp	200,000,000	Rp	200,000,0
d.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
9	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	285,218,000	Rp	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	78,725,000	Rp	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	217,428,000	Rp	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	65,000,000	Rp	
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD			107	
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	110,442,000	Rp	
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa				
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	19	Rp	10,802,900,0
е.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan				
	Daerah Serta Kerjasama Daerah a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sekorgi Waltil Berganistah Prant di Wilayah	Rp	914,583,000	Rp	770,763,0
	Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar				
9	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	250,000,000	Rp	223,316,0
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	400,000,000	Rp	400,000,0
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	250,000,000	Rp	222,850,0
f.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	1200		2,150	
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	=	Rp	2,478,189,0
PR	OVINSI LAMPUNG	Rp	4,897,170,000	Rp	29,344,851,0
a.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
-	Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				

NO		DAEDAH (DDOODAM (MEGIAWAN (CHO MEGIAWAN		ALOKA	121 (K	p.)
		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SEMULA		MENJADI
1		2		3		4
		a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	270,000,000	Rp	=
		OGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM				
		a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	200,000,000	Rp	200,000,000
	c. PR	OGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	1)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda				
		a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	642,000,000	Rp	642,000,000
	2)	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				
		 a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) 	Rp	200,000,000	Rp	200,000,000
	d. PR	OGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	1)	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
		a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	295,442,000	Rp	=
	2)	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
		a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	97,300,000	Rp	
		b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	276,038,000	Rp	
	3)	Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
		a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	175,000,000	Rp	g.
	4)	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD				
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	103,162,000	Rp	÷
	5)	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa				
		a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	(7)	Rp	19,259,300,000
	e. PR	OGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah				
		a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	1,038,228,000	Rp	850,068,000
	2)	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar				
		a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	1,200,000,000	Rp	1,064,583,000
	3)	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
		a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	400,000,000	Rp	356,224,000
		OGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN AN PENCATATAN SIPIL				
	1)	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
		a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	>	Rp	6,772,676,000
11.	PROV	INSI BANTEN	Rp	3,898,538,000	Rp	22,939,386,000
	a. PR	OGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN LAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI			in the	
	2.70	Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
		a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	270,000,000	Rp	2

)	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	ISI (R	* 1
+	<u> </u>		SEMULA		MENJADI
b.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	1	3	i.	4
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	200,000,000	Rp	200,000,00
c.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	695,000,000	Rp	695,000,00
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III				
	a) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp	250,000,000	Rp	250,000,00
d.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	307,788,000	Rp	
	 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	71,295,000	Rp	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	175,874,000	Rp	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
-	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	175,000,000	Rp	
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	102,652,000	Rp	
	 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa 				
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	-	Rp	10,219,700,00
e.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	,			
	 Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah 				
	 a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 	Rp	725,929,000	Rp	584,065,00
	 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 				
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	200,000,000	Rp	147,873,00
	 Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	400,000,000	Rp	400,000,00
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	325,000,000	Rp	289,705,00
f.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	-	Rp	10,153,043,00

NT O	DAEDAH/DDOODAM/VECIATAN/OHD VECIATAN		ALOKA	ASI (R	p.)
NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SEMULA		MENJADI
1	a. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA	+	3		4
	Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan	Rp	80,000,000	Rp	
	Masyarakat Tertinggal	ТСР		Кр	
	b. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan				
	Daerah Serta Kerjasama Daerah	D.	620 414 000	D	F27 077 000
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	632,414,000	Rp	537,077,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	-	Rp	7,137,936,000
.3.	PROVINSI JAWA BARAT	Rp	15,699,252,000	Rp	76,827,041,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
l	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	270,000,000	Rp	9
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM 				
ı	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	241,500,000	Rp	241,500,000
l	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan				
	Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program	Rp	689,000,000	Rp	689,000,000
	Dana Alokasi Khusus (DAK) 2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I	3			
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp	575,000,000	Rp	575,000,000
ı	3) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan				
	Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III				
	 a) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015 	Rp	250,000,000	Rp	250,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	325,230,000	Rp	-
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	141,880,000	Rp	\$ 5
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	443,182,000	Rp	
	 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat 			-000	
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp	9,966,978,000	Rp	ä
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	120,000,000	Rp	-
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD 				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	106,530,000	Rp	=

	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	ASI (R	* 1
4			SEMULA	-	MENJADI
74	2 6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan	-	3	É	4
	Kader Desa				
r	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	(5)	Rp	42,295,700,00
,	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
H	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan				
	Daerah Serta Kerjasama Daerah				
T	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur	Rp	916,952,000	Rp	715,894,00
L	Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	D	450,000,000	D	400.016.00
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp	450,000,000	Rp	429,816,00
	 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 				
H	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan	Rp	200,000,000	Rр	200,000,00
	Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan			- 1	
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan				
-	Perlindungan Masyarakat	D-	450,000,000	D	E33,000,00
	 a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas 	Rp	450,000,000	Rp	533,000,00
r	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan				
	Bencana dan Kebakaran				200000000000000000000000000000000000000
	 a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran 	Rp	553,000,000	Rp	492,690,00
ŀ.	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			•	
	DAN PENCATATAN SIPIL				
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi				
L	Kependudukan (SAK) Terpadu	D		Ь	20 404 441 00
	 a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 	Rp	ଜି	Rp	30,404,441,00
F	PROVINSI JAWA TENGAH	Rp	6,302,230,000	Rp	78,279,256,00
é	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN			110	
L	PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	 a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015 	Rp	270,000,000	Rp	
1	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya				
-	Badan Pengembangan SDM	D.	225 200 000	D	025 000 00
0	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	235,200,000	Rp	235,200,00
F	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH 1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan	-		40	
	Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian,	Rp	632,000,000	Rp	632,000,00
	Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program				
-	Dana Alokasi Khusus (DAK) 2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan				
	Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp	490,000,000	Rp	490,000,00
-	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan				
	Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III				
	a) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp	250,000,000	Rp	250,000,00
-	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan				
	Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	255,372,000	Rp	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelotihan Masyarakat				
H	Pelatihan Masyarakat a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	171,600,000	Rр	
- 1	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp		163	
		1.170	545,530,000	Rp	

	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOK <i>A</i>	ASI (R	₽ p.)
4			SEMULA		MENJADI
98	2 3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		3		4
0	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan	Rp	65,000,000	Rp	
L	Masyarakat Tertinggal	Кρ	00,000,000	Кр	
L	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD		25 244 202		
L	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	96,944,000	Rp	
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa				
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	₹ ,	Rp	60,180,500,00
e	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah				
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	870,584,000	Rp	697,784,00
	 b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah 	Rp	550,000,000	Rp	529,940,00
	 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 				
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	200,000,000	Rp	200,000,00
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	950,000,000	Rp	850,000,00
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	720,000,000	Rp	641,497,00
f	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	-	Rp	13,572,335,00
5 P	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Rp	5,202,967,000	Rp	8,726,726,0
ε	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN				
	PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran	1	NA 100 N 10100 N 10000		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	270,000,000	Rp	
k	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	200,000,000	Rp	200,000,00
C	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		es 15	and i	
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	698,000,000	Rp	698,000,0
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp	470,000,000	Rp	470,000,0
c	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	Rp	288,837,000	Rp	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	ASI (R	
			SEMULA		MENJADI
1	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		3		4
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	60,150,000	Rp	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	123,480,000	Rp	82
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	120,000,000	Rp	
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp	467,340,000	Rp	
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD 				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	96,854,000	Rp	:
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa	D.		В	2 707 202 205
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	~	Rp	3,707,300,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	 Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah 				
	 a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 	Rp	808,306,000	Rp	701,650,000
	b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah	Rp	350,000,000	Rp	329,874,000
	Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		1 000 000 000	-	0.50.000.000
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	1,000,000,000	Rp	860,000,000
	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	D.	250,000,000	D	000 640 000
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran BENCERAM PENATRAN ARMINISTRASI KERENDURAN	Rp	250,000,000	Rp	222,640,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi				
	Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	<u></u>	Rp	1,537,262,000
16.	PROVINSI JAWA TIMUR	Rр	13,447,690,000	Rp	83,225,239,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran	-	250.000.000	-	
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	270,000,000	Rp	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	¢.			
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM 				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	279,600,000	Rp	279,600,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda 				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	672,000,000	Rp	672,000,000
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I	ė.			
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp	582,000,000	Rp	582,000,000
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III				

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	ASI (Rp.)		
NO	DAERAH JI KOGRAM REGIATAN 30B REGIATAN		SEMULA		MENJADI	
1	2	-	3	-	4	
	 a) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015 	Rp	350,000,000	Rp	350,000,000	
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA					
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan					
	Pemerintahan Desa dan Kelurahan					
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan	Rp	267,909,000	Rp		
	Pelatihan Masyarakat					
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	182,745,000	Rp	22	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	596,470,000	Rp		
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		The thirt was a property of the second			
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp	6,292,328,000	Rp		
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	230,000,000	Rp		
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp	450,470,000	Rp		
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD					
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	98,008,000	Rp		
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa					
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	.=	Rр	59,986,100,000	
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		4007	1-	,,,	
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan					
	Daerah Serta Kerjasama Daerah					
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	801,160,000	Rp	614,476,000	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar					
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	950,000,000	Rp	831,889,00	
	 Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 					
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	400,000,000	Rp	534,668,00	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran					
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	1,025,000,000	Rp	908,385,00	
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Regiatan Pengembangan Sistem Administrasi					
	Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan	Rp	_	Rp	18,466,121,00	
	Pencatatan Sipil Provinsi	- T'		T		
17.	PROVINSI BALI	Rp	5,099,465,000	Rp	12,838,250,00	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI					
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran	 	(ADD 0.00			
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	280,000,000	Rp		
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI					
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM					
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	200,000,000	Rp	200,000,000	

DAEDALI / DDOC DAM / WEGIATAN / GUD WEGIATAN		ALOKA	SI (R	p.)
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SEMULA		MENJADI
2 c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		3		4
1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan				
Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda				
a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	846,000,000	Rp	846,000,000
Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				
a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp	175,000,000	Rp	175,000,000
d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan				
Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	Rp	427,270,000	Rp	
Bagi Kepala Desa 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan	кр	421,210,000	ю	
Pelatihan Masyarakat				
a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	75,010,000	Rp	Se.
b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	220,718,000	Rp	(8
3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	65,000,000	Rp	- {
 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD 				
a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	135,396,000	Rp	
5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa				
a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	-	Rp	5,457,200,000
e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
 Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah 				
a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	1,000,071,000	Rp	814,071,000
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		14		
a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	450,000,000	Rp	390,110,00
 Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 				
a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	300,000,000	Rp	300,000,000
 Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 				
a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	925,000,000	Rp	823,999,00
f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				2 25 2 000 000
a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	5	Rp	3,831,870,00
PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rр	14,316,375,000	Rp	23,662,616,00
a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	280,000,000	Rp	
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				

\Box	DADDAY (DDGGDAY (VDGJAMAN (QVD VDGJAMAN		ALOKA	ASI (R	?p.)
0	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SEMULA		MENJADI
	2		3		4
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM 				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	212,800,000	Rp	212,800,000
С	. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda 				
	 a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 	Rp	650,000,000	Rp	650,000,000
d	. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	285,342,000	Rp	-
	 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	97,785,000	Rp	-
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	290,790,000	Rp	læ.
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial				
2	Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM	Rp	9,498,003,000	Rp	=
	Generasi	20.00	145 145 90	2000	
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	200,000,000	Rp	-
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	99,026,000	Rp	
	6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa				N 8
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp		Rp	15,274,400,000
е	. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	 Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah 				
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	824,629,000	Rp	644,465,000
	 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 				
	 a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 	Rp	300,000,000	Rp	250,000,000
	b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan	Rp	500,000,000	Rp	475,000,000
	 Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	600,000,000	Rp	399,000,000
	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	478,000,000	Rp	425,688,000
f.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5			
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	-	Rp	5,331,263,000
9 PI	ROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Rр	13,890,621,000	Rp	20,688,149,000
а	. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	280,000,000	Rp	_

	ı			
2		SEMULA 3		MENJADI 4
AM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
atan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya an Pengembangan SDM				
Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	205,900,000	Rp	205,900,000
AM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
atan Dukungan Manajemen dan Dukungan nis Lainnya Ditjen Bina Bangda				
Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	707,000,000	Rp	707,000,000
AM BINA PEMERINTAHAN DESA				
atan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan erintahan Desa dan Kelurahan				
Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	277,100,000	Rp	
tihan Masyarakat		104 505 000	D	
W=21		25% 10	150	
atan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial	кр	293,110,000	кр	
Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM	Rp	8,170,246,000	Rp	
Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan	Rp	65,000,000	Rp	
atan Dukungan Manajemen dan Dukungan nis Lainnya Ditjen PMD				
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	100,758,000	Rp	
atan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan er Desa				
Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp		Rp	11,678,000,000
AM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
atan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan rah Serta Kerjasama Daerah				
Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	761,722,000	Rp	691,834,00
Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah iatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan	Rp	400,000,000	Rp	379,720,00
sus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		7 70 000 000	-	666 000 00
Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Кр	750,000,000	Кр	666,088,00
indungan Masyarakat		222 222 222		250 200 20
Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	900,000,000	Кр	860,000,00
cana dan Kebakaran				
Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	875,000,000	Rp	779,240,00
AM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN NCATATAN SIPIL				
endudukan (SAK) Terpadu	20:		200	
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	-	Rp	4,720,367,00
KALIMANTAN SELATAN	Rp	3,881,937,000	Rp	22,392,752,00
AM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN SANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
	an Pengembangan SDM Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan AM BINA PEMBANGUNAN DAERAH atan Dukungan Manajemen dan Dukungan his Lainnya Ditjen Bina Bangda Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) AM BINA PEMERINTAHAN DESA atan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan terintahan Desa dan Kelurahan Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa atan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan tihan Masyarakat Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan atan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial aya Masyarakat Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi atan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal atan Dukungan Manajemen dan Dukungan his Lainnya Ditjen PMD Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan atan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan ter Desa Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa AM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN atan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan rah Serta Kerjasama Daerah Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah Dekonsentrasi Penguatan Kawasan sus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Dekonsentrasi Pengasan Batas Daerah dan Pembinaan ketentraman, Ketertiban dan indungan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas atan Pembinaan dan Bahaya Kebakaran Dekonsentrasi Pencegahan Penanggulangan cana dan Kebakaran Dekonsentrasi Pencegahan Penanggulangan cana dan Kebakaran Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran AM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENGENTATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENGENTATAN ADMINISTRASI Kependudukan dan Pencelenggaran Adminis	an Pengembangan SDM Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan AM BINA PEMBANGUNAN DAERAH atan Dukungan Manajemen dan Dukungan nis Lainnya Ditjen Bina Bangda Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) AM BINA PEMERINTAHAN DESA atan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan cerintahan Desa dan Kelurahan Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa atan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan tihan Masyarakat Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah Perasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan atan Pasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial aya Masyarakat Pesilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi atan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal atan Dukungan Manajemen dan Dukungan nis Lainnya Ditjen PMD Pasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan atan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan er Desa Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa AM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN atan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan reh Serta Kerjasama Daerah Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah Dekonsentrasi Penguatan Ketentban dan indungan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Limmas atan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan indungan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Limmas atan Pensilitasi Pencegahan Penanggulangan Cekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Kependudukan dan Pengembangan Sistem Administrasi endudukan (SAK) Terpadu Pencelatara Sipil Provinsi KALIMANTAN SELATAN AM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN SANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI	an Pengembangan SDM Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 205,900,000 MAB BINA PEMBANGUNAN DAERAH atan Dukungan Manajemen dan Dukungan nis Lainnya Ditjen Bina Bangda Penguatan Peran Provinsia dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Pana Alokasi Khusus (DAK) AM BINA PEMERINTAHAN DESA atan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan erintahan Desa dan Kekurahan Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa atan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan tihan Masyarakat Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah Pensilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial aya Masyarakat Pensilitasi Pemberdayaan Pengendalian PNPM Pensembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal atan Dukungan Manajemen dan Dukungan nis Lainnya Ditjen PMD Peraberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan atan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan er Desa Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa Penberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan atan Pengembangan Kapasitas Penguatan kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan atan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan rah Serta Kerjasama Daerah Dekonsentrasi Penjakatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kerjasama antar Daerah atan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan nidungan Masyarakat Penbakahan Nama Rupabumi Unsur Buatan atan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan nidungan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Paga Satpol PP serta Limma atan Pengembangan Sistem Administrasi endudukan (SAK) Terpadu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi KALIMANTAN SELATAN AMANAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KE	an Pengembangan SDM Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan Rp 205,900,000 Rp RAM BIMA PEMBANGUNAN DAERAH atan Dukungan Mansjemen dan Dukungan iis Lainnya Ditjen Bina Bangda Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evalusai Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) AM BIMA PEMERINTAHAN DESA atan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan erintahan Desa dan Kelurahan Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa atan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan tihan Masyarakat Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah Perasilitasi Penberdayaan Adat dan Sosial aya Masyarakat Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah Penatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial aya Masyarakat Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah Penatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial aya Masyarakat Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah Penatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial aya Masyarakat Penataan Jembagan Usaha Ekonomi Masyarakat Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal atan Dukungan Manajemen dan Dukungan ina Laimnya Ditjen PMD Pasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penerintahan atan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan er Desa Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Penguatan dan Pengembangan Rapadan Dekansentrasi Penguatan dan Pengembangan Rapadan Dekansentrasi Penguatan dan Pengembangan Rapadan Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Rapadan Pengembangan Rawasan satan Pembinaan Agara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan Rapadakan Nama Rupabumi Unsur Buatan atan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan indungan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PS estat Limmas atan Pembinaan Adan Pengembangan Repubangan Kapasitas Kelembagaan dan Bahaya Kebakaran Am PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN NCATATAN SIPL Atan Pengembangan Sistem Administrasi endudukan (SAK) Terpadu Penyelenggaraan Administrasi K

			ALOKA	SI (R	tp.)
NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		SEMULA	\-\-\-	MENJADI
1	2	-	3		4
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	280,000,000	Rp	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM 				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	201,800,000	Rp	201,800,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda 				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	709,000,000	Rp	709,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan			220	
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	338,885,000	Rp	=
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	93,770,000	Rp	7-2
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	266,090,000	Rp	177
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	D	65 000 000	-	
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	65,000,000	Rp	-
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp	570,880,000	Rp	=
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	115,574,000	Rp	-
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa				
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	(=)	Rp	14,885,600,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah				
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	709,938,000	Rp	589,038,000
	 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 				
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	300,000,000	Rp	250,000,000
	3) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	231,000,000	Rp	205,720,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	-	Rp	5,551,594,000
21.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Rp	4,441,379,000	Rp	14,229,433,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	280,000,000	Rp	-
• 3					

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	ISI (R	50 N
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SEMULA		MENJADI
1	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		3		4
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	731,000,000	Rp	731,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan				
	Pemerintahan Desa dan Kelurahan	D	202 820 000	D	
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan	Rp	292,829,000	Rp	=
	Pelatihan Masyarakat				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	95,755,000	Rp	(4)
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	299,430,000	Rp	-
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	175,000,000	Rp	=
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp	474,650,000	Rp	=
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD			-	
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	106,110,000	Rp	2
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa				
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	Tel.	Rp	7,109,600,000
	d. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	3			
	 Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah 				
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	654,105,000	Rp	565,545,000
	 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 				
	 a) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan 	Rp	500,000,000	Rp	
	 Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	300,000,000	Rp	300,000,000
	 Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 				
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	532,500,000	Rp	474,475,000
	e. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	-	Rp	5,048,813,000
22	PROVINSI SULAWESI UTARA	De-	10 220 512 000	D	20 497 512 000
44	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI	Rp	10,339,513,000	Rp	20,487,513,000
	Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP	Rp	290,000,000	Rp	5
	Lingkup Kemendagri Tahun 2015 b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	233,200,000	Rp	233,200,000
i	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH	355	27 29	3657	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			LOKASI (Rp.)		
NO	DALKATIJI KOGRANIJ REGIATAN J SOB REGIATAN		SEMULA		MENJADI	
1	2		3	-	4	
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda 					
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	715,000,000	Rp	715,000,000	
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA					
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan					
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan I Bagi Kepala Desa		319,350,000	Rp	-	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat					
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	109,300,000	Rp	·=	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Keluraha	ın Rp	303,830,000	Rp	170	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat					
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp	4,365,338,000	Rp	=	
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaral	sat				
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	175,000,000	Rp	-	
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembang Badan Usaha Milik Desa	an Rp	486,540,000	Rp	-	
	5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD					
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	112,286,000	Rp	=	
	f) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa					
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	120	Rp	12,261,200,000	
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN					
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah					
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	1,029,669,000	Rp	825,269,000	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terlu		255 200 200		0.50 505 000	
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	26 22	Rp	863,605,000	
	b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penega Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningka Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasa	atan	400,000,000	Rp	380,000,000	
	 Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 					
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	400,000,000	Rp	310,000,000	
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran					
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurang Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	gan Rp	425,000,000	Rp	378,488,000	
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL	AN				
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu					
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi	dan Rp	-	Rp	4,520,751,000	
23	PROVINSI GORONTALO	Rp	8,198,667,000	Rp	10,795,041,000	
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAG			- T	,,,,	
	Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran	-		†		
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	290,000,000	Rp	-	

DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	ASI (R	p.)
	<u> </u>	SEMULA		MENJADI
2		3		4
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya				
Badan Pengembangan SDM				
a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	200,000,000	Rp	200,000,00
c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(5)		153	
1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan				
Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda				
a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	690,000,000	Rp	690,000,00
2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				
a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp	360,000,000	Rp	360,000,00
d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan				
Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Pr	335 100 000	Pn	
a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan	Rp	335,120,000	Rp	
2) Regiatan Fennigkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	65,665,000	Rp	
b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	152,670,000	Rp	
3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial		,,		
Budaya Masyarakat				
a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp	3,857,744,000	Rp	
4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	175,000,000	Rp	
 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD 				
a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	118,888,000	Rp	
6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa			Mariday.	
a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	100	Rp	5,748,800,00
e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
 Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah 				
a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur	Rp	828,580,000	Rp	713,820,00
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar	· ·			
a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	275,000,000	Rp	243,724,00
Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat				
a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	300,000,000	Rp	305,000,00
4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	á			
a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	550,000,000	Rp	490,060,00
f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	-	Rp	2,043,637,00
PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp	5,575,964,000	Rp	20,907,880,00
a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN	A			
a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				

	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	ASI (R	* 1
			SEMULA		MENJADI
1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran	i.	3		4
1	A) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	290,000,000	Rp	,
Α	ROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM				
c. P	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan ROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	218,600,000	Rp	218,600,000
1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	677,000,000	Rp	677,000,000
2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air	Rp	175,000,000	Rp	175,000,000
d. P	Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) ROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	276,008,000	Rp	
2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	89,755,000	Rp	4
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	226,150,000	Rp	Ÿ
3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	230,000,000	Rp	
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp	493,770,000	Rp	
4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	102,874,000	Rp	
5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa				
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	127	Rp	14,788,400,000
102500 300	ROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
1) Kegjatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah				
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	846,807,000	Rp	731,307,00
2	Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar	-	50, 000, 000		
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	625,000,000	Rp	553,664,00
3	Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Б	1.050.000.005	Г	041.000.55
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	1,050,000,000	Rp	941,000,00
4	Bencana dan Kebakaran	D	075 000 000	D	045 105 00
r r	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	275,000,000	Rp	245,135,00
L	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Г.			0 577 57 60
	 a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 	Rp	뙬	Rp	2,577,774,00

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	SI (R _I	o.)
NO	Dielettiji Rodiettij itediri ini jood Rediri ini		SEMULA		MENJADI
1	2		3		4
25.	PROVINSI SULAWESI BARAT	Rp	7,852,485,000	Rp	9,951,574,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan	Rp	290,000,000	Rp	= =====================================
	Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	100			
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM 				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	200,000,000	Rp	200,000,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	666,000,000	Rp	666,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				,
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp	185,000,000	Rp	185,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 				-
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	254,194,000	Rp	-
	 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	65,665,000	Rp	æ
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	127,750,000	Rp	2
	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat				-
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp	3,455,815,000	Rp	-
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	 a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 	Rp	230,000,000	Rp	-
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD 				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	96,038,000	Rp	=
	6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa				
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	12	Rp	5,068,400,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				Vr. Vr. 39
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah				
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	982,023,000	Rp	866,238,000
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar				,
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	250,000,000	Rp	223,316,000
	Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	4			
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	300,000,000	Rp	280,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	750,000,000	Rp	668,172,000

2	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA SEMULA	SI (R	p.) Menjadi
t	2		3		4
f.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	٤	Rp	1,794,448,00
PR	OVINSI SULAWESI TENGGARA	Rp	5,301,321,000	Rp	21,791,445,00
a.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	290,000,000	Rp	
b.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	212,000,000	Rp	212,000,00
c.	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda 				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	689,000,000	Rp	689,000,00
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp	225,000,000	Rp	225,000,00
d.	PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	277,636,000	Rp	
	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	93,770,000	Rp	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	248,270,000	Rp	
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	230,000,000	Rp	
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	101,176,000	Rp	
	 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa 				
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	(B)	Rp	14,788,400,00
e.	PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
-	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah	_			
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	884,469,000	Rp	729,047,00
	 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 				
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	700,000,000	Rp	605,217,00
	Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	1,050,000,000	Rp	904,000,00
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan			l	

0	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)			
4			SEMULA		MENJADI
- 7	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan	Rp	300,000,000	Rp	4 267,420,00
	Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	тф	300,000,000	Кр	207,420,000
ı	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
	DAN PENCATATAN SIPIL				
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi				
ı	Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan	Des		Dec	3,371,361,00
	Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	-	Rp	3,371,301,00
7	PROVINSI SULAWESI SELATAN	Rp	7,184,495,000	Rp	30,531,197,00
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN				
-	PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
ı	Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran	D.	200 000 000	D	
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP	Rp	290,000,000	Rp	
	Lingkup Kemendagri Tahun 2015				
ı	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM				
ı	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	259,100,000	Rp	259,100,00
1	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH	3550		38.50	
İ	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan				
	Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda			227	
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program	Rp	766,000,000	Rp	766,000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)				
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan				
ŀ	Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air	Rp	450,000,000	Rp	450,000,00
ı	Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	тер	+30,000,000	тер	+50,000,00
Ì	3) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan				
	Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III				
	a) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp	250,000,000	Rp	250,000,00
ı	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
ŀ	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan				
	Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	366,065,000	Rp	
ı	2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan				
ı	Pelatihan Masyarakat a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Dn	137,935,000	Rp	
		Rp	460,678,000		
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	400,078,000	Rp	
ı	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	D	220 000 000	D	
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	230,000,000	Rp	
ı	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan	Rp	580,690,000	Rp	
ı	Badan Usaha Milik Desa				
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD				
ı	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program	Rp	122,584,000	Rp	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan		vd 200% 35		
Ì	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan				
	Kader Desa	D		-	10.400.000.5
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	\$5.	Rp	18,482,000,00
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
ŀ	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah				
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur	Rp	1,001,443,000	Rp	813,343,00
	Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah				

DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKASI (Rp.)			
		SEMULA MENJADI			
a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	1,000,000,000	Rp	4 887,474,00	
Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat					
a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	500,000,000	Rp	475,000,00	
Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	D	770,000,000	D.	695 721 00	
a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangar Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		770,000,000	Rp	685,731,00	
DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi					
Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan da	n Rp	-	Rp	7,462,549,00	
Pencatatan Sipil Provinsi PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	- P	14 101 500 000		10.056.550.06	
Community and Co	Rp	14,101,563,000	Rp	18,076,779,00	
a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perenggaan Program dan Anggaran					
Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran	D	200 000 000	D		
a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	280,000,000	Rp		
b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM					
a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	223,700,000	Rp	223,700,00	
c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		Rectal Palestace Mark Colony (In 1990) September 200-100			
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda					
a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	789,000,000	Rp	789,000,00	
d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA					
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan					
a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Des Bagi Kepala Desa	a Rp	330,540,000	Rp		
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat		0.5 #0.# 0.00			
a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	86,725,000	Rp		
b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan 3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	Rp	217,010,000	Rp		
a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp	8,733,022,000	Rp		
4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	la la				
a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	175,000,000	Rp		
5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD	-	10812000	F		
a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan	Rp	107,146,000	Rp		
Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp		Rp	8,373,200,00	
e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	179		T.P	0,070,200,00	
Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah					
a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	1,023,920,000	Rp	832,742,0	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOK <i>A</i>	SI (R	
			SEMULA		MENJADI
1	2 b) Dekonsentrasi Penguatan dan Pengembangan	Des	3 400,000,000	Rp	4 378,784,000
	Kerjasama antar Daerah	Rp	400,000,000	кþ	376,764,000
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar			200	
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	850,000,000	Rp	744,328,000
	 Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	650,000,000	Rp	577,000,000
	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	235,500,000	Rp	209,726,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	=	Rp	5,948,299,000
29	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rр	18,300,716,000	Rp	38,947,684,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	280,000,000	Rp	=
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM 				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	259,100,000	Rp	259,100,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda 				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	735,000,000	Rp	735,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan	6			
	Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	Rp	305,635,000	Rp	-
	Bagi Kepala Desa 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan				
	Pelatihan Masyarakat	_		_	
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	151,905,000	Rp	120
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	407,890,000	Rp	
	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		10.045 = 5		
	a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp	12,341,537,000	Rp	=
	4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	 a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 	Rp	65,000,000	Rp	-
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD 				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	100,486,000	Rp	-
	6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa				
(0)	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	-	Rp	23,536,400,000

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	ISI (R	p.)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SEMULA		MENJADI
1	2		3		4
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	 Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah 				
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	1,004,163,000	Rp	810,827,000
	 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 				
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	600,000,000	Rp	522,941,000
	 b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan 	Rp	700,000,000	Rp	504,461,000
	 Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	900,000,000	Rp	815,000,000
	4) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	450,000,000	Rp	400,752,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	s	Rp	11,363,203,000
30	PROVINSI MALUKU	Rp	9,484,326,000	Rp	16,233,494,000
*******	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN				
	PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	290,000,000	Rp	
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
	1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	232,700,000	Rp	232,700,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda 				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	731,000,000	Rp	731,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	300,232,000	Rp	
	 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 				
Ì	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	93,440,000	Rp	6
	1-1 P321 P PC1 P111	Rp	235,174,000	Rp	(4
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	1		1	
	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat				
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial	Rp	4,394,167,000	Rp	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM	Rp	4,394,167,000	Rp	
	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Al Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi	Rp Rp	4,394,167,000	Rp Rp	
	3) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat a) Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi 4) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan				

NO.	DAFDAU/DDOGDAM/VECIATAN/CIID VECIATAN		ALOKA	SI (R	p.)
NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SEMULA		MENJADI
1	2 6) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan		3		4
	Kader Desa				
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	100	Rp	9,831,200,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	 Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah 				
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	894,339,000	Rp	781,289,000
	 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 				
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	675,000,000	Rp	597,941,000
	3) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	550,000,000	Rp	399,000,000
	 Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 				
	 a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran 	Rp	750,000,000	Rp	668,214,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	ē	Rp	2,992,150,000
31	PROVINSI MALUKU UTARA	Rp	5,281,719,000	Rp	15,207,355,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN				
	PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	290,000,000	Rp	-
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI				
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	234,300,000	Rp	234,300,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				V
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda 				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	654,000,000	Rp	654,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	271,160,000	Rp	-
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	91,725,000	Rp	2
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	198,950,000	Rp	E
	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
	 a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal 	Rp	175,000,000	Rp	-
	b) Dekonsentrasi Bidang Pembinaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Rp	450,390,000	Rp	=
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD 				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	105,416,000	Rp	2

NO.	DADDAN (DDGGDAM (VDGYAMAN (GVD VDGYAMAN		ALOKA	SI (R	р.)
NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SEMULA		MENJADI
1	2 5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan		3		4
	Kader Desa				
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	157	Rp	8,859,200,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan				
	Daerah Serta Kerjasama Daerah	Б	1 050 770 000	-	001 040 000
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	1,060,778,000	Rp	901,348,000
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		270.000.000	- Daniel	240 524 000
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	250,000,000	Rp	218,724,000
	 Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	800,000,000	Rp	818,766,000
	 Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 	2			
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	700,000,000	Rp	623,644,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	-	Rp	2,897,373,000
32	PROVINSI PAPUA	Rp	5,561,933,000	Rp	54,393,189,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran				
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	290,000,000	Rp	-
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	2	,		
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM 				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	275,200,000	Rp	275,200,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda 				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	792,000,000	Rp	792,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				
	a) Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)	Rp	300,000,000	Rp	300,000,000
	3) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III				
	a) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat (PPKE-BM) Tahun 2015	Rp	300,000,000	Rp	300,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan				
	Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa	Rp	390,281,000	Rp	φ
	Bagi Kepala Desa 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan	_			
	Pelatihan Masyarakat				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rр	201,510,000	Rp	<u>-</u>

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOK <i>A</i>	SI (R	р.)
110	DAEIGHIJI ROGIGINIJ REGITIAN JOOD REGITIAN		SEMULA		MENJADI
1	2 3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		3		4
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	65,000,000	Rp	-
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	131,316,000	Rp	-
	 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa 	Dec		Rp	40,449,200,000
	e. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Rp		тъ	+0,++9,200,000
	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	712,216,000	Rp	619,464,000
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar				
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	300,000,000	Rp	247,873,000
	b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Pengelola Perbatasan	Rp	500,000,000	Rp	470,000,000
	 Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	300,000,000	Rp	350,000,000
	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	375,000,000	Rp	334,275,000
	f. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	-	Rp	10,255,177,000
33	PROVINSI PAPUA BARAT	Rр	4,066,590,000	Rp	19,793,125,000
	a. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI				
	1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran			-	
	a) Koordinasi Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan DKTP Lingkup Kemendagri Tahun 2015	Rp	290,000,000	Rp	=
	b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI		,		
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM 				
	a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp	272,300,000	Rp	272,300,000
	c. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda 				
	a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	751,000,000	Rp	751,000,000
	d. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	329,278,000	Rp	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	113,270,000	Rp	
	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	230,750,000	Rp	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	SI (R	
			SEMULA		MENJADI
1	2 3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		3		4
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	65,000,000	Rp	5
	4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD				
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	109,586,000	Rp	=
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa				
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	12	Rp	13,427,600,000
e.	. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	 Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah 	3			
	a) Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah	Rp	855,406,000	Rp	750,906,000
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar	-	WW. 000 000		5.45.050.000
	a) Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan	Rp	750,000,000	Rp	646,368,000
	 Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 				
	a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP serta Linmas	Rp	300,000,000	Rp	300,000,000
f.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3	3		
-	DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi				
	Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp	2	Rp	3,644,951,000
34 PF	ROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rp	2,225,039,000	Rp	7,933,293,000
a.	. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda 				
	 a) Penguatan Peran Provinsi dalam Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) 	Rp	717,000,000	Rp	717,000,000
b.	. PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA				
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
	a) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Desa	Rp	295,979,000	Rp	-
	Kegjatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	3			
	a) Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Daerah	Rp	64,150,000	Rp	(A)
2	b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Rp	299,770,000	Rp	-
-	3) Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	В.	120,000,000	-	
	a) Dekonsentrasi Usaha Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Rp	120,000,000	Rp	-
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD	-			
	a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Rp	106,140,000	Rp	-
	5) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa				
	a) Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa	Rp	(=)	Rp	4,096,400,000
c.	. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	Kegjatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran		Section Assessment		
	a) Dekonsentrasi Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Kebakaran	Rp	622,000,000	Rp	554,181,000
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar				

NO	DAEDAH/DDOODAM/RECIATAN/GUD RECIATAN	ALOKASI (Rp.)				
NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4			
	 b) Dekonsentrasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Status Hukum Batas Negara di Darat, Peningkatan 	Rp -	Rp 475,000,000			
,,,,	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 					
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Rp -	Rp 2,090,712,000			

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENDAGRI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK MASING-MASING PROVINSI

10	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKASI (Rp.)				
10	DALIMITI ROGINIMI REGIATAN 30D REGIATAN		SEMULA		MENJADI		
1	2		3		4		
1.	PROVINSI ACEH	Rp	2,120,000,000	Rp	29,393,289,000		
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN						
	 Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 						
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana						
	- Kota Subulussalam	Rp	1,400,000,000	Rp	1,400,000,00		
	- Kota Sabang	Rp	-	Rp	1,500,000,00		
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH						
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I						
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)						
	- Kab. Pidie Jaya	Rp	720,000,000	Rp	720,000,00		
	d. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu						
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota						
	- Kota Subulussalam	Rp	(E)	Rp	766,175,00		
	- Kab. Aceh Barat Daya	Rp	120	Rp	977,356,00		
	- Kab. Pidie Jaya	Rp	-	Rp	962,377,00		
	- Kota Sabang	Rp	-	Rp	653,595,00		
	- Kab. Aceh Besar	Rp	171	Rp	1,560,223,00		
	- Kab. Pidie	Rp		Rp	1,616,786,00		
	- Kab. Aceh Utara	Rp	(2)	Rp	1,849,697,00		
	- Kab. Aceh Timur	Rp	1-1	Rp	1,620,043,00		
	- Kab. Aceh Selatan	Rp	(-)	Rp	1,230,336,00		
	- Kab. Aceh Barat	Rp	151	Rp	1,050,400,00		
	- Kab. Aceh Tengah	Rp	9 <u>6</u> %	Rp	1,115,503,00		
	- Kab. Aceh Tenggara	Rp	(4)	Rp	1,177,977,00		
	- Kab. Simeulue	Rp	-	Rp	942,016,00		
	- Kab. Aceh Singkil	Rp	(F)	Rp	1,010,840,00		
	- Kab. Bireuen	Rp		Rp	1,466,022,00		
	- Kab. Gayo Lues	Rp	(2)	Rp	970,957,00		
	- Kab. Aceh Jaya	Rp	(=)	Rp	914,729,00		
	- Kab. Nagan Jaya	Rp	;=:	Rp	1,013,357,00		
	- Kab. Aceh Tamiang	Rp	-	Rp	1,190,962,00		
	- Kab. Bener Meriah	Rp		Rp	1,015,374,00		
	- Kota Banda Aceh	Rp	(2)	Rp	952,593,00		
	- Kota Langsa	Rp	(4)	Rp	864,776,00		
	- Kota Lhoksumawe	Rp	-	Rp	851,195,00		
₹.	PROVINSI SUMATERA UTARA	Rp	2,150,000,000	Rp	46,930,376,00		
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN						
	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran						
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana						

10	DAFRAH/PROGRAM/KECIATAN/CIID KECIATAN		ALOKA	SI (R	0.)
.0	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SEMULA		MENJADI
1	2		3		4
	- Kab. Tapanuli Tengah	Rp	1,400,000,000	Rp	1,400,000,000
1	o. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber				
-	Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)	Des	750,000,000	Dn	750,000,00
ć	- Kab. Tapanuli Tengah :. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp	750,000,000	Rp	750,000,000
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	 a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota 				
	- Kab. Tapanuli Tengah	Rp	2	Rр	1,431,014,00
	- Kab. Deli Serdang	Rp	128	Rp	2,850,875,00
	- Kab. Karo	Rp	-	Rp	1,424,111,00
	- Kab. Langkat	Rp	157	Rp	2,182,417,00
	- Kab. Simalungun	Rp	(5)	Rр	2,346,913,00
ľ	- Kab. Labuan Batu	Rp	120	Rр	1,273,470,00
	- Kab. Dairi	Rp	<u> </u>	Rp	1,236,622,00
	- Kab. Tapanuli Utara	Rp	=	Rр	1,260,155,00
	- Kab. Tapanuli Selatan	Rp	(元)	Rp	1,231,462,00
ľ	- Kab. Asahan	Rp	100	Rp	1,930,075,00
f	- Kab. Nias	Rp	0	Rp	1,110,723,00
ŀ	- Kab. Samosir	Rp	-	Rp	944,875,00
F	- Kab. Mandailing Natal	Rp	i e	Rp	1,627,831,00
i	- Kab. Nias Selatan	Rp	-	Rp	1,828,626,00
	- Kab. Pakpak Bharat	Rp	15.1	Rp	825,726,00
ŀ	- Kab. Humbang Hasundutan	Rp	-	Rp	1,026,082,00
F	- Kab. Toba Samosir	Rp	(4)	Rp	1,146,563,00
	- Kab. Serdang Bedagai	Rp	(-)	Rp	1,643,699,00
	- Kab. Batu Bara	Rp	(5)	Rp	1,111,995,00
	- Kab. Padang Lawas	Rp	=	Rp	1,139,414,00
-	- Kab. Padang Lawas Utara	Rp	2	Rp	1,078,832,00
F	- Kab. Labuan Batu Selatan	Rp	-	Rp	1,030,109,00
ŀ	- Kab. Labuan Batu Utara	Rp	-	Rp	1,172,329,00
	- Kab. Nias Utara	Rp	(5)	Rp	1,127,400,00
	- Kab. Nias Barat	Rp	428	Rp	995,208,00
ŀ	- Kota Medan	Rp	120	Rp	3,498,741,00
ŀ	- Kota Tebing Tinggi	Rp	(Ac.)	Rp	836,883,00
5	- Kota Binjai	Rp	-	Rp	973,571,00
	- Kota Pematang Siantar	Rp		Rp	1,023,542,00
	- Kota Tanjung Balai	Rp	(<u>e</u>)	Rp	894,540,00
F	- Kota Sibolga	Rp		Rp	738,150,00
F	- Kota Padang Sidempuan	Rp	-	Rp	917,225,00
2	- Kota Gunungsitoli	Rp	-	Rp	921,198,00
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp	5,195,000,000	Rp	25,689,041,000
- 1	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.4	3,120,000,000	-72	20,000,011,000
	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
ŀ	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan				
	Bencana di Daerah Rawan Bencana				
ľ	- Kota Pariaman	Rp	1,300,000,000	Rp	1,300,000,00
Ī	o. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		34	-10	
F	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I	1			

	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	SI (Rp	-
+			SEMULA	<u> </u>	MENJADI
+	2 a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber		3	 	4
	Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)				
	- Kab. Solok	Rp	500,000,000	Rp	500,000,00
	- Kab. Solok Selatan	Rp	240,000,000	Rp	240,000,00
	- Kab. Tanah Datar	Rp	425,000,000	Rp	425,000,0
	- Kab. Padang Pariaman	Rp	300,000,000	Rp	300,000,0
	- Kab. Lima Puluh Kota	Rp	330,000,000	Rp	330,000,0
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III				
	a) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat				
	- Kab. Solok	Rp	900,000,000	Rp	900,000,0
	- Kab. Tanah Datar	Rp	600,000,000	Rp	600,000,0
	- Kab. Lima Puluh Kota	Rp	600,000,000	Rp	600,000,0
,	e. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	 a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota 				
ı	- Kota Pariaman	Rp	(#)	Rp	760,397,0
	- Kab. Solok	Rp	(Rp	1,294,191,0
	- Kab. Solok Selatan	Rp	-	Rp	919,798,0
t	- Kab. Tanah Datar	Rp) = 3	Rp	1,284,792,0
F	- Kab. Padang Pariaman	Rp) =)	Rp	1,453,104,0
ŀ	- Kab. Lima Puluh Kota	Rp	-	Rp	1,265,059,0
ŀ	- Kab. Agam	Rp	/#/	Rp	1,488,727,0
ŀ	- Kab. Pasaman	Rp	-	Rp	1,147,955,0
ŀ	- Kab. Pesisir Selatan	Rp	(4)	Rp	1,423,593,0
ŀ	- Kab. Kepulauan Mentawai	Rp	(4)	Rp	897,954,0
ŀ	- Kab. Dharmasraya	Rp	-	Rp	1,069,428,0
ŀ	- Kab. Pasaman Barat	Rp	(2)	Rp	1,274,065,0
ŀ	- Kab. Sawahlunto-Sinjunjung	Rp		Rp	1,006,440,0
ŀ	- Kota Bukittinggi	Rp		Rp	724,782,0
	- Kota Padang Panjang	Rp	<u>12</u> 0	Rp	675,883,0
	- Kota Solok	Rp	(<u>2</u>)	Rp	651,276,0
ŀ	- Kota Sawah Lunto	Rp	120	Rp	697,252,0
ŀ	- Kota Padang	Rp		Rp	1,635,028,0
2	- Kota Payakumbuh	Rp	-	Rp	824,317,0
	PROVINSI RIAU	Rp	2,700,000,000	Rp	19,271,111,0
ě	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	 Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 				
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana				
	- Kab. Rokan Hulu	Rp	1,300,000,000	Rp	1,300,000,0
	 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 				
	 a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 				
	- Kab. Kepulauan Meranti	Rp	1,400,000,000	Rp	1,400,000,0
	e. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi	l			

O	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	SI (R	o.)
	Bribititi i Rodiaini Rodii ini joob Rodii ini		SEMULA		MENJADI
1	2		3		4
	 a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota 				
	- Kab. Kepulauan Meranti	Rp	(-)	Rp	998,302,00
	- Kab. Rokan Hulu	Rp	(4)	Rp	1,490,030,00
	- Kab. Kampar	Rp	(4)	Rp	1,734,616,00
	- Kab. Bengkalis	Rp	-	Rp	1,303,097,00
	- Kab. Indragiri Hulu	Rp	120	Rp	1,342,503,00
	- Kab. Indragiri Hilir	Rp	-	Rp	1,682,767,00
	- Kab. Pelalawan	Rp	-	Rp	1,236,978,00
	- Kab. Rokan Hilir	Rp	(2)	Rp	1,577,521,00
	- Kab. Siak	Rp		Rp	1,331,310,00
	- Kab. Kuantan Singingi	Rp	131	Rp	1,273,961,00
	- Kota Pekanbaru	Rp	.=.	Rp	1,633,574,00
	- Kota Dumai	Rp		Rp	966,452,00
		1.45	1952	149	200,102,00
5.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp	2,150,000,000	Rp	8,465,400,00
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar				
	 a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 				
	- Kab. Bintan	Rp	500,000,000	Rp	500,000,00
	- Kab. Kep. Anambas	Rp	1,000,000,000	Rp	
	- Kab, Karimun	Rp	650,000,000	Rp	650,000,00
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
	- Kab. Bintan	Rp		Rp	943,206,00
	- Kab. Kep. Anambas	Rp	=	Rp	806,742,00
	- Kab. Karimun	Rp	=	Rp	1,118,666,00
	- Kab. Natuna	Rp	-	Rp	947,238,00
	- Kab. Lingga	Rp	-	Rp	867,588,00
	- Kota Batam	Rp	-	Rp	1,855,469,00
	- Kota Tanjung Pinang	Rp	¥	Rp	776,491,00
6.	PROVINSI JAMBI	Rp	= =	Rp	15,753,470,00
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	 Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 				
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana	1000		garden -	Su Digitalista and American
	- Kab. Batang Hari	Rp	₩	Rp	1,500,000,00
	- Kab. Tanjung Jabung Timur	Rp	~	Rp	1,500,000,00
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota	P		-	1 000 700
		Rp	(=)	Rp	1,066,798,00
	- Kab. Batang Hari	_		1	g group of the second
	- Kab. Batang Hari - Kab. Tanjung Jabung Barat - Kab. Bungo	Rp Rp	-	Rp Rp	1,164,929,00 1,250,314,00

			ALOKA	SI (Rp	5.)
NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SEMULA		MENJADI
1	2	1000000	3	0000000	4
	- Kab. Kerinci	Rp	~	Rp	1,188,598,000
	- Kab. Merangin	Rp	2	Rp	1,478,821,000
	- Kab. Tanjung Jabung Timur	Rp	2	Rp	1,052,229,000
	- Kab. Tebo	Rp	127	Rp	1,184,229,000
	- Kab. Muaro Jambi	Rp	(2)	Rp	1,190,307,000
	- Kota Jambi	Rp	<u>e</u> :	Rp	1,278,192,000
	- Kota Sungai Penuh	Rp	V28	Rp	816,806,000
7.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rp	1	Rp	24,611,976,000
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
	- Kab. Musi Banyuasin	Rp	2	Rp	1,468,236,000
	- Kab. Ogan Komering Ulu	Rp	· 21	Rp	1,167,893,000
	- Kab. Muara Enim	Rp	·=	Rp	1,607,821,000
	- Kab. Lahat	Rp		Rp	1,478,918,000
	- Kab. Musi Rawas	Rp	-	Rp	1,298,161,000
	- Kab. Ogan Komering Ilir	Rp	-	Rp	1,715,609,000
	- Kab. Banyuasin	Rp	-	Rp	1,822,702,000
	- Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Rp		Rp	1,671,898,000
	- Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Rp		Rp	1,426,700,000
	- Kab. Ogan Ilir	Rp		Rp	1,376,872,000
	- Kab. Empat Lawang	Rp			1,127,080,000
		_	150	Rp	1,734,467,000
	- Kab. Panukal Abab Lematang Ilir	Rp	-	Rp	the matter of the state of the
	- Kab. Musi Rawas Utara	Rp		Rp	1,695,903,000
	- Kota Palembang	Rp		Rp	2,411,521,000
	- Kota Prabumulih	Rp	-	Rp	883,406,000
	- Kota Pagar Alama	Rp		Rp	807,952,000 916,837,000
	- Kota Lubuk Linggau	Rp		Rp	910,837,000
8.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	Rp	5	Rp	6,255,064,000
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi				
	Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
	- Kab. Belitung	Rp	-	Rp	797,550,000
	- Kab. Bangka	Rp	140	Rp	1,073,532,000
	- Kab. Bangka Barat	Rp		Rp	893,180,000
	- Kab. Bangka Tengah	Rp		Rp	878,638,000
	- Kab. Bangka Selatan	Rp	200	Rp	926,300,000
		20000	-		CONTRACTOR MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF TH
	- Kab. Belitung Timur	Rp		Rp	847,044,000
	- Kota Pangkal Pinang	Rp	,=-	Rp	838,820,000
9.	PROVINSI BENGKULU	Rp	1,600,000,000	Rp	12,032,666,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana				
	- Kab. Lebong	Rp	1,300,000,000	Rp	1,300,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH	1			

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	.SI (Rp	1.)
110	Dielettij i Rodienij Reditini j 30D Reditini		SEMULA		MENJADI
1	2		3		4
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber				
	Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)				
	- Kab. Lebong	Rp	300,000,000	Rp	300,000,00
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
	- Kab. Lebong	Rp	51	Rp	963,267,00
	- Kab. Bengkulu Utara	Rp	5.	Rp	1,242,349,00
	- Kab. Bengkulu Selat <i>a</i> n	Rp	5	Rp	953,550,00
	- Kab. Rejang Lebong	Rp	æ	Rp	1,163,064,00
	- Kab. Seluma	Rp	1=1	Rp	1,114,747,00
	- Kab. Kaur	Rp	1-1	Rp	1,057,217,00
	- Kab. Muko-Muko	Кp	(F)	Кp	1,063,687,00
	- Kab. Kepahiang	Rp	=	Rp	902,222,00
	- Kab. Bengkulu Tengah	Rp	=	Rp	912,912,00
	- Kota Bengkulu	Rp	8	Rp	1,059,651,00
	PDG/MANAY AMEN'NO	D	260,000,000	D	04 006 868 00
0.	PROVINSI LAMPUNG a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	260,000,000	Rp	24,296,868,00
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan				
	Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)				
	- Kab. Lampung Barat	Rp	260,000,000	Rp	260,000,00
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
	- Kab. Lampung Barat	Rp	· (5)	Rp	1,179,274,00
	- Kab. Lampung Selatan	Rp	·8:	Rp	2,244,465,00
	- Kab. Lampung Tengah	Rp	©	Rp	2,705,364,00
	- Kab. Lampung Utara	Rp	.50	Rp	1,963,795,0
	- Kab. Tulang Bawang	Rp	5	Rp	1,342,496,00
	- Kab. Tanggamus	Rp	(5)	Rp	1,689,141,00
	- Kab. Lampung Timur	Rp	.	Rp	2,256,217,00
	- Kab. W ay Kanan	Rp	(E)	Rp	1,377,772,0
	- Kab. Pesawaran	Rp	æ	Rp	1,330,524,0
	- Kab. Pringsewu	Rp	-	Rp	1,236,629,0
	- Kab. Mesuji	Rp	-	Rp	1,033,600,0
	- Kab. Tulang Bawang Barat	Rp	-	Rp	1,019,224,0
	- Kab. Pesisir Barat	Rp	-	Rp	1,748,347,0
	- Kota Bandar Lampung	Rp	(m)	Rp	2,116,069,0
	- Kota Metro	Rp	8	Rp	793,951,0
1.	PROVINSI BANTEN	Rp	600,000,000	Rp	17,851,538,00
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH			,,	
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III				
	a) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat				

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	SI (R	o.)
	, ,		SEMULA		MENJADI
1	2	ъ	3	-	4
	- Kab. Serang b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp	600,000,000	Rp	600,000,000
	DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi				
	Kependudukan (SAK) Terpadu a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan				
	Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
	- Kab. Serang	Rp	-	Rp	2,563,092,000
	- Kab. Pandeglang	Rp	(8)	Rp	2,460,674,000
	- Kab. Lebak	Rp	-	Rp	2,262,253,00
	- Kab. Tangerang	Rp	-	Rp	3,678,500,00
	- Kota Tangerang	Rp	-	Rp	2,259,282,00
	- Kota Cilegon	Rp	-	Rp	1,056,171,00
	- Kota Serang	Rp	No.	Rp	1,144,775,00
	- Kota Tangerang Selatan	Rp	(4)	Rp	1,826,791,00
		Б			21 155 540 000
12.	PROVINSI DKI JAKARTA a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<u>Rp</u>	<u>-</u>	Rp	21,157,740,000
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
ı	- Kota Jakarta Pusat	Rp	/Es	Rp	2,992,181,00
	- Kota Jakarta Utara	Rp	143	Rp	3,100,945,00
	- Kota Jakarta Barat	Rp	121	Rp	4,352,199,00
	- Kota Jakarta Selatan	Rp	120	Rp	4,525,075,00
	- Kota Jakarta Timur	Rp	120	Rp	5,259,885,00
	- Kabupaten Kepulauan Seribu	Rp	120	Rp	927,455,00
13.	PROVINSI JAWA BARAT	Rp	6,645,000,000	Rp	78,074,194,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	 Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 				
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana				
	- Kab. Kuningan	Rp	1,300,000,000	Rp	1,300,000,00
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I 	-			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber				
	Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM) - Kab. Kuningan	Rp	1,580,000,000	Rp	1,580,000,00
	- Kab. Cianjur	Rp	950,000,000	Rp	950,000,00
	- Kab. Cirebon	Rp	630,000,000	Rp	630,000,00
	- Kab. Indramayu		760,000,000		760,000,00
	and the second s	Rp		Rp	325,000,00
	- Kab. Bandung 2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan	Rp	325,000,000	Rp	323,000,00
	Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III a) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan				
	Ekowisata Berbasis Masyarakat	020-04	Service And Administration of Control of Con	peper	S. SWALLS STRAIGS INC.
	- Kab. Kuningan	Rp	1,100,000,000	Rp	1,100,000,00
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	 a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota 				

	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	-	ALOKA	ът (Кр	•
╄		-	SEMULA		MENJADI
╁	2 - Kab. Kuningan	Rp	3 -	Rp	4 2,388,511,00
-	- Kab. Cianjur	Rp	120	Rp	3,522,837,00
H	- Kab. Cirebon	Rp	120	Rp	3,539,070,0
-	- Kab. Indramayu	Rp	120	Rp	3,107,245,0
H	- Kab. Bandung	. 8	400	Rp	4,741,733,0
	- Kab. Bogor	Rp		Rp	5,282,071,0
	- Kab. Sukabumi	Rp Rp	120	10.97	4,090,936,0
-	- Kab. Bekasi			Rp	
-	0.000 18 100	Rp	453	Rp	3,523,007,0
	- Kab. Karawang	Rp	·5/	Rp	3,108,897,0
	- Kab. Purwakarta	Rp	·=	Rp	1,732,895,0
L	- Kab. Subang	Rp	(7)	Rp	2,796,155,0
L	- Kab. Sumedang	Rp	(5)	Rp	2,226,916,0
L	- Kab. Garut	Rp	(E)	Rp	3,712,558,0
	- Kab. Tasikmalaya	Rp	150	Rp	3,100,951,0
	- Kab. Ciamis	Rp	(#F)	Rp	2,355,718,0
	- Kab. Majalengka	Rp	(= 0	Rp	2,393,925,0
L	- Kab. Bandung Barat	Rp	-	Rp	2,431,599,0
	- Kab. Pangandaran	Rp	-	Rp	1,949,806,0
	- Kota Bandung	Rp	-	Rp	3,525,272,0
	- Kota Bogor	Rp	-	Rp	1,555,046,0
	- Kota Sukabumi	Rp	-	Rp	925,159,0
	- Kota Cirebon	Rp	-	Rp	884,329,0
	- Kota Bekasi	Rp	~	Rp	3,067,885,0
	- Kota Depok	Rp	-	Rp	2,301,593,0
	- Kota Tasikmalaya	Rp	-	Rp	1,348,446,0
	- Kota Cimahi	Rp	121	Rp	1,052,620,0
	- Kota Banjar	Rp	120	Rp	764,014,0
P	ROVINSI JAWA TENGAH	Rp	9,155,000,000	Rp	78,481,912,0
a.	. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana				
F	- Kab. Cilacap	Rp	1,100,000,000	Rp	1,100,000,0
	- Kab. Banjarnegara	Rp	-	Rp	1,400,000,0
	- Kab. Purworejo	Rp	120	Rp	1,400,000,0
				151	
b .	. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
b	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH 1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				
b	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I A) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber				
b	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I	Rp	435,000,000	Rp	435,000,0
b.	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I A Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)		435,000,000 885,000,000	Rp Rp	435,000,0 885,000,0
b	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I A) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM) Kab. Cilacap Kab. Brebes	Rp	12 (20)	Rp	20 22
b.	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM) - Kab. Cilacap - Kab. Brebes - Kab. Pemalang	Rp Rp Rp	885,000,000	Rp Rp	885,000,0
<u>b</u> .	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM) - Kab. Cilacap - Kab. Brebes - Kab. Pemalang - Kab. Kendal	Rp Rp Rp Rp	885,000,000 780,000,000 680,000,000	Rp Rp Rp	885,000,0 780,000,0 680,000,0
b.	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM) - Kab. Cilacap - Kab. Brebes - Kab. Pemalang - Kab. Kendal - Kota Semarang	Rp Rp Rp Rp	885,000,000 780,000,000 680,000,000 995,000,000	Rp Rp Rp Rp	885,000,0 780,000,0 680,000,0 995,000,0
b	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM) - Kab. Cilacap - Kab. Brebes - Kab. Pemalang - Kab. Kendal - Kota Semarang - Kab. Semarang	Rp Rp Rp Rp Rp	885,000,000 780,000,000 680,000,000 995,000,000 580,000,000	Rp Rp Rp Rp Rp	885,000,0 780,000,0 680,000,0 995,000,0
b.	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM) - Kab. Cilacap - Kab. Brebes - Kab. Pemalang - Kab. Kendal - Kota Semarang - Kab. Semarang - Kab. Magelang	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	885,000,000 780,000,000 680,000,000 995,000,000 580,000,000 215,000,000	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	885,000,0 780,000,0 680,000,0 995,000,0 580,000,0
b	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM) - Kab. Cilacap - Kab. Brebes - Kab. Pemalang - Kab. Kendal - Kota Semarang - Kab. Semarang - Kab. Semarang - Kab. Nagelang - Kab. Sragen	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	885,000,000 780,000,000 680,000,000 995,000,000 580,000,000 215,000,000 530,000,000	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	885,000,0 780,000,0 680,000,0 995,000,0 580,000,0 215,000,0
b	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM) - Kab. Cilacap - Kab. Brebes - Kab. Pemalang - Kab. Kendal - Kota Semarang - Kab. Semarang - Kab. Magelang	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	885,000,000 780,000,000 680,000,000 995,000,000 580,000,000 215,000,000	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	885,000,0 780,000,0

DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/S	SUB KEGIATAN		ALOKA	SI (Rp	
2			SEMULA 3		MENJADI 4
2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggar	aan dan		3		-
Pembangunan Urusan Pemerintah					
a) Fasilitasi Pengelolaan dan Pen	••••••••••••••••••••••••				
Ekowisata Berbasis Masyaraka - Kab. Sragen	ıt	Rp	900,000,000	Rp	900,000,
c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRAS	TEPENDIDIEAN	TOP	200,000,000	1/1	500,000,
DAN PENCATATAN SIPIL	I REI ENDODORM				
Kegiatan Pengembangan Sistem A Kependudukan (SAK) Terpadu	dministrasi				
a) Penyelenggaraan Administrasi	-				
Pencatatan Sipil Kabupatan/K - Kab. Cilacap	ota	Des		Des	2 808 022
- Kab. Cılacap - Kab. Brebes		Rp Rp		Rp	2,898,032, 2,771,543,
		- 57.0		Rp	20 % 2
Thus I officially		Rp	1751	Rp	2,312,862
- Kab. Kendal		Rp	151	Rp	1,953,552,
- Kota Semarang		Rp	151	Rp	2,396,847
- Kab. Semarang		Rp	-	Rp	1,932,586
- Kab. Magelang		Rp	9:	Кp	2,288,033,
- Kab. Sragen		Rp	·=	Rp	1,953,980
- Kab. Boyolali		Rp	1 2 0	Rp	1,950,514
- Kab. Grobogan		Rp	-	Rp	2,383,754
- Kab. Karanganyar		Rp	-	Rp	1,789,454
- Kab. Demak		Rp	e	Rp	1,956,208,
- Kab. Pekalongan		Rp	(4)	Rp	1,889,674
- Kab. Batang		Rp	res	Rp	1,643,754
- Kab. Tegal		Rp	141	Rp	2,333,774
- Kota Tegal		Rp	128	Rp	851,169
- Kab. Pati		Rp	20	Rp	2,282,269,
- Kab. Kudus		Rp	-	Rp	1,533,403
- Kab. Jepara		Rp	-	Rp	2,044,539
- Kab. Rembang		Rp	42	Rp	1,471,930,
- Kab. Blora		Rp	42	Rp	1,775,851,
- Kab. Banyumas		Rp	454	Rp	2,878,986
- Kab. Purbalingga		Rp	45.	Rp	1,882,683
- Kab. Banjarnegara		Rp	450	Rр	1,980,666
- Kab. Temanggung		Rp	(5)	Rp	1,756,113
- Kab. Wonosobo		Rp	151	Rp	1,728,620
- Kab. Purworejo		Rp	£50.	Rp	1,652,426
- Kab. Kebumen		Rp	源	Rp	2,490,867
- Kab. Klaten		Rp	(a)	Rp	2,415,681,
- Kab. Sukoharjo		Rp	(=)	Rp	1,693,666
- Kab. Wonogiri		Rp	(m)	Rp	2,162,810
- Kota Salatiga		Rp	-	Rp	755,946
- Kota Pekalongan		Rp	-	Rp	873,687
- Kota Magelang		Rp	-	Rp	682,452
- Kota Surakarta		Rp	-	Rp	1,158,581,
PROVINSI D.I YOGYAKARTA	or to the control of	Rp	2,415,000,000	Rp	10,372,708,
a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DA					
Kegiatan Pembinaan Penyelenggar Pembangunan Urusan Pemerintak	ian Daerah I				
a) Fasilitasi Penanganan Lahan F Daya Air Berbasis Masyarakat	A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE				
- Kab. Sleman	ere M	Rp	450,000,000	Rp	450,000

NO	DAEDAU/DDOCDAM/REGIATAN/GUD REGIATAN		ALOKA	SI (R	o.)
NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SEMULA		MENJADI
1	2	3-11-30	3	2000	4
	- Kab. Kulon Progo	Rp	350,000,000	Rp	350,000,000
	- Kab. Bantul	Rp	765,000,000	Rp	765,000,000
	- Kab. Gunung Kidul	Rp	850,000,000	Rp	850,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
	- Kab. Sleman	Rp	=	Rp	1,975,413,000
	- Kab. Kulon Progo	Rp	-	Rp	1,214,736,000
	- Kab. Bantul	Rp	-	Rp	1,865,748,000
	- Kab. Gunung Kidul	Rp	(-)	Rp	1,705,061,000
	- Kota Yogyakarta	Rp	(4)	Rp	1,196,750,000
16.	PROVINSI JAWA TIMUR	Rр	6,625,000,000	Rp	81,849,691,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	 Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 				
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana				
	- Kab. Tuban	Rp	1,500,000,000	Rp	1,500,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)				
	- Kab. Bangkalan	Rp	215,000,000	Rp	215,000,000
	- Kab. Bondowoso	Rp	515,000,000	Rp	515,000,000
	- Kab. Probolinggo	Rp	420,000,000	Rp	420,000,000
	- Kab. Blitar	Rp	490,000,000	Rp	490,000,000
	- Kab. Jember	Rp	437,000,000	Rp	437,000,000
	- Kab. Ngawi	Rp	348,000,000	Rp	348,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III				
	a) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat				
	- Kab. Probolinggo	Rp	900,000,000	Rp	900,000,000
	- Kab. Situbondo	Rp	600,000,000	Rp	600,000,000
	- Kab. Malang	Rp	600,000,000	Rp	600,000,000
	- Kab. Pacitan	Rp	600,000,000	Rp	600,000,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	 a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota 				
	- Kab. Tuban	Rp	120	Rp	2,176,497,000
	- Kab. Bangkalan	Rp	(2)	Rp	2,026,159,000
	- Kab. Bondowoso	Rp	(2)	Rp	1,847,383,000
	- Kab. Probolinggo	Rp	-	Rp	2,188,161,000
	- Kab. Blitar	Rp	-100	Rp	2,247,767,000
	- Kab. Jember	Rp	1850	Rp	3,870,980,000
	- Kab. Ngawi	Rp	(AE)	Rp	1,843,597,000
	- Kab. Situbondo	Rp	4555	Rp	1,613,369,000
	- Kab. Malang	Rp	1350	Rp	3,766,620,000
	- Kab. Pacitan	Rp	-	Rp	1,394,097,000

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	SI (Rp	•
по	Dielenii i Rodienii Redininii 300 Redininii		SEMULA		MENJADI
1	2		3		4
	- Kab. Gresik	Rp		Rp	2,201,348,000
	- Kab. Mojokerto	Rp	120	Rp	2,049,524,000
	- Kab. Sidoarjo	Rp	120	Rp	2,784,325,000
	- Kab. Jombang	Rp	120	Rp	2,363,694,000
	- Kab. Sampang	Rp	· (E)	Rp	1,698,213,000
	- Kab. Pamekasan	Rp	·@1	Rp	1,634,333,000
	- Kab. Sumenep	Rp	·©:	Rp	2,246,944,000
	- Kab. Banyuwangi	Rp	183	Rp	2,770,573,000
	- Kab. Pasuruan	Rp	183	Rp	2,675,989,000
	- Kab. Lumajang	Rp	100	Rp	2,136,937,000
	- Kab. Kediri	Rp	.51	Rp	2,611,462,000
	- Kab. Tulungagung	Rp	5.	Rp	2,064,779,000
	- Kab. Nganjuk	Rp	51	Rp	2,015,758,000
	- Kab. Trenggalek	Rp	æ	Rp	1,586,907,000
	- Kab. Madiun	Rp	=	Rp	1,608,130,000
	- Kab. Magetan	Rp		Rp	1,648,277,000
	- Kab. Ponorogo	Rp		Rp	1,951,438,000
	- Kab. Bojonegoro	Rp	-	Rp	2,513,190,000
	- Kab. Lamongan	Rp	-	Rp	2,535,785,000
	- Kota Surabaya	Rp	÷	Rp	4,163,702,000
	- Kota Mojokerto	Rp	-	Rp	692,934,000
	- Kota Malang	Rp	-	Rp	1,454,090,000
	- Kota Pasuruan	Rp	ω	Rp	811,717,000
	- Kota Probolinggo	Rp	ω.	Rp	862,979,000
	- Kota Blitar	Rp	~	Rp	733,554,000
	- Kota Kediri	Rp	2	Rp	864,542,000
	- Kota Madiun	Rp	(2)	Rp	783,854,000
	- Kota Batu	Rp	(2)	Rp	785,083,000
17.	PROVINSI BALI	Rp	350,000,000	Rр	11,270,859,000
1).	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH	149	555,555,555	100	11,270,000,000
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan				
	Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I	ļ			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber				
	Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM) - Kab. Karangasem	Rp	350,000,000	Rр	350,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	I'\P	000,000,000	1/1	000,000,000
	DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan				
	Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota - Kab. Karangasem	Rp	·	Rp	1,198,782,000
	- Kab. Buleleng	Rp	-	Rp	1,610,976,000
	- Kab. Jembrana	Rp	-	Rp	1,067,265,000
	- Kab. Klungkung	Rp		Rp	937,075,000
	- Kab. Gianyar	Rp		Rp	1,295,857,000
	- Kab. Bangli	Rp		Rp	986,493,000
	- Kab. Badung	Rp			1,246,141,000
	- Kab. Tabanan			Rp	1,345,956,000
	20033 Springer - 30000 Springer Springe	Rp	-	Rp	
	- Kota Denpasar	Rp		Rp	1,232,314,000
18.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp	6,090,000,000	Rp	23,697,743,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				

MO	DAEDAH/DDOODAM/REGIAWAN/GUD REGIAWAN		ALOKA	ASI (R).)
NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SEMULA		MENJADI
1	2		3		4
	 Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 				
	 a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 				
	- Kab. Sambas	Rp	1,500,000,000	Rp	1,500,000,000
	- Kab. Bengkayang	Rp	1,500,000,000	Rp	1,500,000,000
	- Kab. Kapuas Hulu	Rp	2,200,000,000	Rp	2,200,000,000
	- Kab. Sanggau	Rp	890,000,000	Rp	890,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	 a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota 				
	- Kab. Sambas	Rp	120	Rp	1,683,222,000
	- Kab. Bengkayang	Rp	221	Rp	1,233,998,000
	- Kab. Kapuas Hulu	Rp	(2)	Rp	1,337,713,000
	- Kab. Sanggau	Rp	127	Rp	1,389,483,000
	- Kab. Sintang	Rp	(4)	Rp	1,289,959,000
	- Kab. Mempawah	Rp	2	Rp	1,107,631,000
	- Kab. Ketapang	Rp	-	Rр	1,630,032,000
	- Kab. Landak	Rp	5 <u>5</u> 2	Rp	1,302,188,000
	- Kab. Melawi	Rp	5.	Rp	1,086,117,000
	- Kab. Sekadau	Rp	.50	Rp	961,294,000
	- Kab. Kayong Utara	Rp	.50	Rp	951,479,000
	- Kab. Kubu Raya	Rp		Rp	1,412,567,000
	- Kota Pontianak	Rp		Rp	1,331,414,000
	- Kota Singkawang	Rp	E)	Rp	890,646,000
19.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Rp	=	Rp	15,253,515,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	 Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 				
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana				
	- Kab. Kotawaringin Barat	Rp		Rp	1,500,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			-4	-,,,
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
	- Kab. Kapuas	Rp	(-	Rp	1,411,112,000
	- Kab. Barito Utara	Rp	9	Rp	956,358,000
	- Kab. Barito Selatan	Rp		Rp	808,631,000
	- Kab. Kotawaringin Timur	Rp	9	Rp	1,360,576,000
	- Kab. Kotawaringin Barat	Rp	· ·	Rp	927,462,000
	- Kab. Katingan	Rp		Rp	1,051,014,000
	- Kab. Seruyan	Rp	Φ.	Rp	967,263,000
	- Kab. Sukamara	Rp	.51	Rp	760,809,000
	- Kab. Lamandau	Rp		Rp	850,739,000
	- Kab. Gunung Mas	Rp		Rp	1,018,205,000
	- Kab. Pulang Pisau	Rp		Rp	902,825,000
		-		Rp	931,576,000
	- Kab. Murung Raya	Rp	·		

1	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	-	ALOKA	pr) rer	•
+	2	-	SEMULA 3		MENJADI 4
t	- Kota Palangkaraya	Rp	- -	Rp	871,016,0
. 1	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Rp	1,400,000,000	Rp	16,344,205,0
H	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	-1	_, , ,	-1	
	 Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 				
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan				
ŀ	Bencana di Daerah Rawan Bencana - Kab, Tanah Bumbu	Rp	1,400,000,000	Rр	1,400,000,0
ŀ	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Ю	1,400,000,000	тф	1,400,000,0
-	DAN PENCATATAN SIPIL 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi				
	Kependudukan (SAK) Terpadu	1			
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
	- Kab. Tanah Bumbu	Rp	E	Rp	1,140,917,0
-	- Kab. Banjar	Rp	(m)	Rp	1,579,357,0
	- Kab. Tanah Laut	Rp	5	Rp	1,151,089,0
L	- Kab. Tapin	Rp	190	Rp	1,054,293,0
L	- Kab. Hulu Sungai Selatan	Rp	-	Rp	1,065,455,0
L	- Kab. Hulu Sungai Tengah	Rp	-	Rp	1,063,105,0
L	- Kab. Barito Kuala	Rp	-	Rp	1,306,982,0
L	- Kab. Tabalong	Rp		Rp	1,070,649,0
ŀ	- Kab. Kotabaru	Rp		Rp	1,374,341,0
ŀ	- Kab. Hulu Sungai Utara	Rp	120	Rp	1,053,977,0
L	- Kab. Balangan	Rp		Rp	903,213,0
L	- Kota Banjarmasin	Rp		Rp	1,273,046,0
-	- Kota Banjar Baru	Rp		Rp	907,781,0
.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Rp	=	Rp	13,342,017,0
á	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
I	- Kab. Paser	Rp	-	Rp	1,158,682,0
ľ	- Kab. Berau	Rp	120	Rp	1,125,835,0
	- Kab. Kutai Barat	Rp	9	Rp	1,325,315,0
ſ	- Kab. Kutai Timur	Rp	20	Rp	1,582,462,0
	- Kab. Penajam Paser Utara	Rp	9	Rp	920,007,0
ľ	- Kab. Kutai Kertanegera	Rp	-61	Rp	1,774,937,0
	- Kab. Mahakam Ulu	Rp	- <u>(2</u> 6	Rp	1,689,919,0
	- Kota Samarinda	Rp	450	Rp	1,515,175,0
	- Kota Balikpapan	Rp	·653	Rp	1,351,658,0
	- Kota Bontang	Rp	(5)	Rp	898,027,0
	PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp	4,200,000,000	Rp	19,746,209,0
4	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	 Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 				
ļ	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan	1			
L	Bencana di Daerah Rawan Bencana	 	1 100 000 000	D	1 100 000 0
- 1	- Kota Bitung	Rp	1,100,000,000	Rp	1,100,000,0

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	SI (R	
			SEMULA		MENJADI
1	2		3		4
	 a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau 				
	- Kab. Kepulauan Talaud	Rp	1,100,000,000	Rp	1,100,000,000
	- Kab. Kepulauan Sangihe	Rp	2,000,000,000	Rp	2,000,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
	DAN PENCATATAN SIPIL				
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan				
	Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
	- Kab. Kepulauan Talaud	Rp	·=	Rp	1,165,932,000
	- Kab. Kepulauan Sangihe	Rp	-	Rp	1,112,702,000
	- Kota Bitung	Rp	. - .:	Rp	980,457,000
	- Kab. Minahasa	Rp	-	Rp	1,546,122,000
	- Kab. Bolaang Mongondo	Rp	·=:	Rp	1,221,055,000
	- Kab. Minahasa Selatan	Rp	H	Rр	1,249,372,000
	- Kab. Minahasa Tenggara	Rp	-	Rp	1,015,997,000
	- Kab. Minahasa Utara	Rp	~	Rp	1,067,159,000
	- Kab. Bolaang Mongondo Utara	Rp	-	Rp	836,346,000
	- Kab. Sitaro	Rp	-	Rp	882,087,000
	- Kab. Bolaang Mongondo Selatan	Rp	-	Rp	793,070,000
	- Kab. Bolaang Mongondo Timur	Rp	124	Rp	810,100,000
	- Kota Manado	Rp	120	Rp	1,255,097,000
	- Kota Tomohon	Rp	(2)	Rp	824,137,000
	- Kota Mobago	Rp	121	Rр	786,576,000
		, in.		ē	
23.	PROVINSI GORONTALO	Rp	1,480,000,000	Rp	8,042,985,000
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan				
	Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber				
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)				
	- Kab. Boalemo	Rp	535,000,000	Rp	535,000,000
	- Kab. Gorontalo Utara	Rp	350,000,000	Rp	350,000,000
	- Kab. Gorontalo	Rp	265,000,000	Rp	265,000,000
	- Kab. Bone Bolango	Rp	330,000,000	Rp	330,000,000
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		59, 100		20 40
	DAN PENCATATAN SIPIL				
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan				
	Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
	- Kab. Boalemo	Rp	-	Rp	925,523,000
	- Kab. Gorontalo Utara	Rp	/eX	Rp	1,009,371,00
	- Kab. Gorontalo	Rp	(4)	Rp	1,471,249,00
	- Kab. Bone Bolango	Rp	120	Rp	1,212,703,000
	- Kab. Pohuwato	Rp	100	Rp	1,026,555,000
	- Kota Gorontalo	Rp	-	Rp	917,584,000
				- 51	
24.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp	3,435,000,000	Rp	19,811,496,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	<u> </u>			
	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Repeated day Kebakaran				
	Bencana dan Kebakaran a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan	-			
	Bencana di Daerah Rawan Bencana				
	- Kab. Morowali	Rp	1,400,000,000	Rp	1,400,000,000
	- Kab. Sigi	Rp	1,400,000,000	Rp	1,400,000,000

	DARDAM (DDGGDAM (VDGJAMAN (GVD VDGJAMAN		ALOKA	SI (Rp	o.)
NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SEMULA		MENJADI
1	2		3		4
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I 				
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)				
	- Kab. Donggala	Rp	635,000,000	Rp	635,000,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	 a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota 				
	- Kab. Morowali	Rp	123	Rp	959,089,000
	- Kab. Sigi	Rp	191	Rp	1,229,711,000
	- Kab. Donggala	Rp	45%	Rp	1,300,832,000
	- Kab. Poso	Rp	1755	Rp	1,278,191,000
	- Kab. Toli-Toli	Rp	.=.	Rp	1,031,745,000
	- Kab. Banggai	Rp		Rp	1,498,874,000
	- Kab. Buol	Rp	444	Rp	1,016,106,000
	- Kab. Banggai Kepulauan	Rp	(5)	Rp	1,031,328,000
	- Kab. Parimo	Rp	=	Rp	1,626,000,000
	- Kab. Tojo Una-Una	Rp	(#T)	Rp	987,784,000
	- Kab. Banggai Laut	Rp		Rp	1,623,961,000
	- Kab. Morowali Utara	Rp	-	Rp	1,716,765,000
	- Kota Palu	Rp)#(Rp	1,076,110,000
25.	PROVINSI SULAWESI BARAT	Rp	2,355,000,000	Rp	9,889,861,000
40.	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				-,,
	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana				
	- Kab. Polewali Mandar	Rp	1,300,000,000	Rp	1,300,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		300 300 40A-17	_	20' 30' 10'
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan				
	Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber				
	Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM) - Kab. Majene	ъ.	1 055 000 000	D	1 055 000 000
	- Kab. Majene c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp	1,055,000,000	Rp	1,055,000,000
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
	- Kab. Polewali Mandar	Rp	/e/	Rp	1,532,214,000
	- Kab. Majene	Rp	-	Rp	934,088,000
	- Kab. Mamuju	Rp	-	Rp	1,046,307,000
	- Kab. Mamuju Utara	Rp	(4)	Rp	1,123,255,000
	- Kab. Mamasa	Rp	121	Rp	1,242,681,000
	- Kab. Mamuju Tengah	Rp	-	Rp	1,656,316,000
0.5	DECLENAL ON AND OF ACT.	D.	1 710 000 000	n	04 700 450 000
26.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Rp	1,710,000,000	Rp	24,720,459,000
	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
ı	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan				

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	SI (R	•
110	Dibiting Rodia ing Rodin ing 300 Rodin in		SEMULA		MENJADI
1	2	_	3		4
	- Kota Kendari	Rp	1,100,000,000	Rp	1,100,000,000
	- Kab. Buton	Rp		Rp	1,500,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I 				
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber				
	Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)				
	- Kab. Muna	Rp	610,000,000	Rp	610,000,000
	c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota			6750	
	- Kab. Muna	Rp	e	Rp	1,324,095,000
	- Kota Kendari	Rp	-	Rp	1,086,791,000
	- Kab. Buton	Rp	-5:	Rp	883,427,000
	- Kab. Kolaka	Rp	170	Rp	1,066,957,000
	- Kab. Konawe Selatan	Rp	170	Rp	1,447,231,000
	- Kab. Bombana	Rp	170	Rp	1,273,125,000
	- Kab. Wakatobi	Rp	=	Rp	905,454,000
	- Kab. Kolaka Utara	Rp	=	Rp	1,103,868,000
	- Kab. Konawe	Rp	=	Rp	1,417,415,000
	- Kab. Konawe Utara	Rp	-	Rp	911,934,000
	- Kab. Buton Utara	Rp) = :	Rp	808,452,000
	- Kab. Kolaka Timur	Rp	Э.	Rp	1,769,765,000
	- Kab. Konawe Kepulauan	Rp	/ = /	Rp	1,581,313,000
	- Kota Bau-Bau	Rp	/ = /	Rp	907,130,000
	- Kab. Muna Barat	Rp	/ = /	Rp	1,721,258,000
	- Kab. Buton Selatan	Rp	=	Rp	1,641,008,000
	- Kab. Buton Tengah	Rp	(<u>+</u>)	Rp	1,661,236,000
27.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	Rp	8,235,000,000	Rp	40,782,242,000
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	-			
	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan				
	Bencana di Daerah Rawan Bencana				
	- Kab. Luwu Utara	Rp	1,100,000,000	Rp	1,100,000,000
	- Kab. W ajo	Rp	1,100,000,000	Rp	1,100,000,000
	- Kab. Maros	Rp	1,100,000,000	Rp	1,100,000,000
	- Kab. Bantaeng	Rp	1,100,000,000	Rp	1,100,000,000
	- Kota Palopo	Rp	Ψ.	Rp	1,200,000,000
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH				
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I				
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PKLSDA-BM)				
	- Kab. Maros	Rp	950,000,000	Rp	950,000,000
	- Kab. Pinrang	Rp	620,000,000	Rp	620,000,000
	- Kab. Bone	Rp	615,000,000	Rp	615,000,000
	- Kab. Bulukumba	Rp	750,000,000	Rp	750,000,000
	2) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III				
	a) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Masyarakat				

о	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	4	ALOKA	SI (Rp	o.)
_			SEMULA		MENJADI
	2	т.	3	D	4
-	- Kab. Bantaeng c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp	900,000,000	Rp	900,000,0
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
	- Kab. Luwu Utara	Rp	(F)	Rp	1,266,343,0
	- Kab. Wajo	Rp)=)	Rp	1,440,837,0
	- Kab. Maros	Rp	-	Rp	1,355,888,0
	- Kab. Pinrang	Rp	=	Rp	1,318,610,0
Ī	- Kab. Bone	Rp)=)	Rp	2,105,955,0
Ī	- Kab. Bulukumba	Rp	(=)	Rp	1,297,243,0
Ì	- Kab. Bantaeng	Rp	=	Rр	948,808,0
Ì	- Kab. Gowa	Rp	(=)	Rp	1,808,744,0
ı	- Kab. Tana Toraja	Rp	120	Rp	1,315,454,0
ŀ	- Kab. Luwu	Rp	120	Rp	1,531,733,0
ŀ	- Kab. Sinjai	Rp	2	Rp	1,043,669,0
ŀ	- Kab. Jeneponto	Rp	9	Rр	1,292,164,0
-	- Kab. Selayar	Rp	(E)	Rp	1,017,907,0
ŀ	- Kab. Takalar	Rp	<u> </u>	Rp	1,115,616,0
ŀ	- Kab. Barru	Rp	_	Rp	946,681,0
ŀ	- Kab. Sidenreng Rapang	Rp	100	Rp	1,201,490,0
ŀ	- Kab. Pangkajene Kepaulauan	Rp	465	Rp	1,294,421,0
ŀ		-	(5)		t) 1) (i)
ŀ	- Kab. Soppeng	Rp		Rp	1,060,957,0
I	- Kab. Enrekang	Rp	15)	Rp	1,145,842,0
ŀ	- Kab. Luwu Timur	Rp	15)	Rp	1,175,217,0
ļ	- Kab. Toraja Utara	Rp	(E)	Rp	1,365,299,0
	- Kota Makassar	Rp	运	Rp	2,508,631,0
	- Kota Pare-Pare	Rp	(5)	Rp	830,524,0
ŀ	- Kota Palopo	Rp	-	Rp	959,209,0
3.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Rp	1,400,000,000	Rp	15,101,047,0
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		***		100 100 100
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran				
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana				
ſ	- Kab. Bima	Rp	1,400,000,000	Rp	1,400,000,00
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan				
ŀ	Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota - Kab. Bima	Rp	<u>@</u>	Rp	1,565,695,00
ŀ	- Kab. Lombok Barat	- 5	apt.	(5)	1,555,942,00
ŀ	0000 8 9 00 00 00	Rp		Rp	
ŀ	- Kab. Lombok Tengah	Rp	100	Rp	1,925,127,00
	- Kab. Lombok Timur	Rp	- ES	Rp	2,340,095,00
	- Kab. Sumbawa	Rp	(E)	Rp	1,608,620,00
	- Kab. Dompu	Rp	170	Rp	996,401,00
ſ	- Kab. Sumbawa Barat	Rp		Rp	917,487,00
	- Kab. Lombok Utara	Rp	15)	Rp	935,051,00
	- Kota Mataram	Rp	=	Rp	1,056,557,00
	- Kota Bima	Rp		Rр	800,072,00

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKA	ISI (R	
300	* * *	-	SEMULA	<u> </u>	MENJADI
1	2	-	3		4
29.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp	6,910,000,000	Rp	34,869,023,00
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan				
	Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar				
	 a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau 				
	Kecil Terluar				
	- Prov. Nusa Tenggara Timur	Rp	210,000,000	Rp	
	- Kab. Kupang	Rp	1,500,000,000	Rp	1,500,000,00
	- Kab. Timor Tengah Utara	Rp	1,100,000,000	Rp	1,100,000,00
	- Kab. Malaka	Rp	1,500,000,000	Rp	1,500,000,00
	- Kab. Alor	Rp	1,500,000,000	Rp	1,500,000,00
	- Kab. Belu	Rp	1,100,000,000	Rp	1,100,000,00
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
	DAN PENCATATAN SIPIL				
	 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan				
	Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota				
	- Kab. Kupang	Rp	=	Rp	1,609,235,00
	- Kab. Timor Tengah Utara	Rp		Rp	1,460,242,00
	- Kab. Malaka	Rp	(=)	Rp	1,871,999,00
	- Kab. Alor	Rp	(=)	Rp	1,448,957,00
	- Kab. Belu	Rp	(2)	Rp	1,123,399,00
	- Kab. Timor Tengah Selatan	Rp	(2)	Rp	1,715,256,00
	- Kab. Sika	Rp	(2)	Rp	1,468,902,00
	- Kab. Flores Timur	Rp	(2)	Rp	1,364,645,00
	- Kab. Ende	Rp	(2)	Rp	1,404,582,00
	- Kab. Ngada	Rp	(E)	Rp	1,285,166,00
	- Kab. Manggarai	Rp	6:	Rp	1,242,952,00
	- Kab. Sumba Timur	Rp	(E)	Rp	1,403,475,00
	- Kab. Sumba Barat	Rp	(E)	Rp	985,852,00
	- Kab. Lembata	Rp	150	Rp	1,228,549,00
	- Kab. Rotendao	Rp	150	Rp	1,047,691,00
	- Kab. Manggarai Barat	Rp	170	Rp	1,191,346,00
	- Kab. Nageko	Rp	-	Rp	944,409,00
	- Kab. Sumba Tengah	Rp	E1	Rp	901,268,00
	- Kab. Sumba Barat Daya	Rp	(m)	Rp	1,284,798,00
	- Kab. Manggarai Timur	Rp	ie.	Rp	1,162,941,00
	- Kab. Sabu Raijua	Rp	1=1	Rp	918,603,00
	- Kota Kupang	Rp	1=1	Rp	1,104,756,00
	Contribution (action) Address (in				ADMINISTRATION CONTRACTOR (ACCORDING
30.	PROVINSI MALUKU	Rp	1,000,000,000	Rp	15,191,296,00
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN				
	 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 				
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar				
	- Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp	1,000,000,000	Rp	1,000,000,00
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				- Land on Phone Wile of Capital
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu				
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota	1			

O	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				SI (Rp.)		
			SEMULA		MENJADI		
1	2	-	3		4		
	- Kab. Maluku Tenggara Barat	Rp	(E)	Rp	1,184,213,00		
	- Kab. Maluku Tengah	Rp	(2)	Rp	1,780,482,00		
	- Kab. Maluku Tenggara	Rp	(2)	Rp	1,294,104,00		
	- Kab. Buru	Rp	(2)	Rp	1,264,352,00		
	- Kab. Kepulauan Aru	Rp	(의)	Rp	1,237,544,00		
	- Kab. Seram Bagian Barat	Rp	(E)	Rp	1,375,019,00		
	- Kab. Seram Bagian Timur	Rp	(E)	Rp	1,445,642,00		
	- Kab. Maluku Barat Daya	Rp	=	Rp	1,448,744,00		
	- Kab. Buru Selatan	Rp	(5)	Rp	1,062,166,00		
	- Kota Ambon	Rp		Rp	1,140,872,00		
	- Kota Tual	Rp	50	Rp	958,158,00		
1.	PROVINSI MALUKU UTARA	Rp	=	Rp	13,233,165,00		
	a. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			7 (5 - 1 (4			
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu						
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota						
	- Kab. Halmahera Tengah	Rp	(5)	Rp	1,070,829,00		
	- Kab. Halmahera Utara	Rp	(5)	Rp	1,481,600,00		
	- Kab. Halmahera Selatan	Rp	(5)	Rp	2,092,012,00		
	- Kab. Kepulauan Sula	Rp		Rp	1,307,310,00		
	- Kab. Halmahera Timur	Rp	-	Rp	1,174,169,00		
	- Kab. Halmahera Barat	Rp	-	Rp	1,154,352,00		
	- Kab. Pulau Morotai	-		1,550	966,938,00		
		Rp	15.1	Rp	10 18		
	- Kab. Pulau Taliabu	Rp	P.	Rp	1,830,996,00		
	- Kota Ternate	Rp	F	Rp	1,029,782,00		
	- Kota Tidore Kepulauan	Rp	-	Rp	1,125,177,00		
2.	PROVINSI PAPUA	Rp	8,520,000,000	Rp	63,906,406,00		
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			-			
	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran						
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana						
	- Kab. Lanny Jaya	Rp	1,500,000,000	Rp	1,500,000,00		
	- Kab. Nabire	Rp	1,400,000,000	Rp	1,400,000,00		
	- Kota Jayapura	Rp		Rp	2,000,000,00		
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar						
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar						
	- Prov. Papua	Rp	1,500,000,000	Rp	764,700,00		
	- Kab. Merauke	Rp	1,350,000,000	Rр	1,350,000,00		
	- Kota Jayapura	Rp	1,000,000,000	Rp	1,000,000,00		
	b. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH	(5)	o 0 0	- E	0 0		
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan						
	Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I	1		I			
	a) Fasilitasi Penanganan Lahan Kritis dan Sumber						

DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKASI (Rp.) SEMULA MENJA		
	+-	3		4
Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III		30 7 20		
a) Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasa Ekowisata Berbasis Masyarakat	1			
- Kab. Merauke	Rp	900,000,000	Rp	900,000,00
c. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 				
a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota	e e			
- Kab. Lanny Jaya	Rp	120	Rp	2,753,658,0
- Kab. Merauke	Rp	E-0	Rp	1,829,567,0
- Kab. Nabire	Rp	-	Rp	1,679,348,0
- Kota Jayapura	Rp	-	Rр	1,216,690,0
- Kab. Jayapura	Rp	-	Rp	1,782,245,0
- Kab. Biak Numfor	Rp	=	Rp	1,779,213,0
- Kab. Yapen Waropen	Rp	-	Rp	1,556,149,0
- Kab. Jayawijaya	Rp	(5)	Rp	2,843,388,0
- Kab. Paniai	Rp	•	Rp	1,676,008,0
- Kab. Puncak Jaya	Rp	=	Rp	2,370,033,0
- Kab. Mimika	Rp	(23)	Rp	1,823,935,0
- Kab. Mappi	Rp	(2)	Rp	1,745,116,0
- Kab. Asmat	Rp	(2)	Rp	1,799,948,0
- Kab. Boven Digul	Rp	-	Rp	1,921,529,0
- Kab. Sarmi	Rp	je.	Rp	1,356,853,0
- Kab. Keerom	Rp	-	Rp	1,199,744,0
- Kab. Tolikara	Rp	F	Rp	3,322,613,0
- Kab. Pegunungan Bintang	Rp	-	Rp	2,580,089,0
- Kab. Mamberamo Raya	Rp	5	Rp	1,505,262,0
- Kab. Waropen	Rp	.50	Rp	1,524,353,0
- Kab. Yakuhimo	Rp	-	Rp	3,618,692,0
- Kab. Supiori	Rp	·53	Rр	1,139,835,0
- Kab. Mamberamo Tengah	Rp	S	Rp	1,183,984,0
- Kab. Dogiyai	Rp	2	Rp	1,697,029,0
- Kab. Yalimo	Rp	(2)	Rp	1,184,210,0
- Kab. Nduga	Rp	-	Rp	2,462,170,0
- Kab. Puncak	Rp	E1	Rp	1,645,679,0
- Kab. Deiyai	Rp		Rp	1,384,457,0
- Kab. Intan Jaya	Rp	-	Rp	1,539,909,0
PROVINSI PAPUA BARAT a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Rp	2,500,000,000	Rp	25,790,106,0
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar				
a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar				

MO	DAFDAU/DDOGDAM/VECIATAN/CIID VECIATAN		ALOKASI (Rp.)				
NO 1	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2	SEMULA		MENJADI			
		0.000	3	02000	4		
	- Kab. Raja Ampat	Rp	2,500,000,000	Rp	2,500,000,000		
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu						
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota						
	- Kab. Raja Ampat	Rp	=	Rp	2,077,440,000		
	- Kab. Manokwari	Rp	(5)	Rp	1,178,237,000		
	- Kab. Sorong	Rp	(E)	Rp	1,764,841,000		
	- Kab. Fakfak	Rp	450	Rp	1,679,423,000		
	- Kab. Sorong Selatan	Rp	(2)	Rр	1,599,005,000		
	- Kab. Teluk Bintuni	Rp		Rp	2,068,218,000		
	- Kab. Teluk Wondama	Rp	100	Rp	1,559,550,000		
	- Kab. Kaimana	6200		51			
	SURVENIED ARREST STATE CONTROL STATE	Rp		Rp	1,367,553,000		
	- Kab. Tambrauw	Rp		Rp	2,328,378,000		
	- Kab. Maybrat	Rp	9	Rp	2,114,176,000		
	- Kab. Pegunungan Arfak	Rp	÷	Rp	2,218,022,000		
	- Kab. Manokwari Selatan	Rp	(m)	Rp	1,833,685,000		
	- Kota Sorong	Rp	(E)	Rp	1,501,578,000		
34.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rp	1,500,000,000	Rp	6,568,857,000		
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN						
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar						
	a) Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar						
	- Kab. Nunukan	Rp	1,500,000,000	Rp	1,500,000,000		
	b. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu						
	a) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan/Kota						
	- Kab. Nunukan	Rp	9	Rp	1,222,686,000		
	- Kab. Bulungan	Rp	120	Rp	954,759,000		
	- Kab. Malinau	Rp	-	Rp	1,157,212,000		
	- Kab. Tanah Tidung	Rp	(4)	Rp	822,247,000		
	- Kota Tarakan	Rp	(H)	Rp	911,953,000		

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO